



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso No. 2 Palangka Raya - Kalimantan Tengah 73112

Telp. (0536) 3220517/ 3229663

Website : www.dislutkan.kalteng.go.id

Email : dislutkan@kalteng.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA penyusunan **“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022”** ini dapat diselesaikan. Penyusunan LKIP ini secara umum merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan strategi pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengarah pada prinsip-prinsip *good governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai serta pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di bidang kelautan dan perikanan. Sangat disadari bahwa LKIP ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang hasil pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

Palangka Raya, Februari 2023

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607271993031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
IKHTISAR EKSEKUTIF	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	2
1.4 Susunan Struktur Organisasi	4
1.5 Keadaan Personil dan Kepegawaian	5
1.6 Sistematika Penyajian LKIP	11
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	14
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	14
2.1.2 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	16
2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	20
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	21
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
3.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja	28
3.1.1 Metode Pengukuran Kinerja	29
3.1.2 Hasil Pengukuran Kinerja	29
3.2 Evaluasi Kinerja	31
3.2.1 Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	32
3.2.2 Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan	35

3.2.3	Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	37
3.2.4	Indikator Kinerja Jumlah Kebutuhan Benih	41
3.2.5	Indikator Kinerja Angka Konsumsi Ikan (AKI)	45
3.2.6	Indikator Kinerja Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	48
3.2.7	Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	51
3.2.8	Indikator Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	53
3.2.9	Indikator Kinerja Persentase Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Ketentuan / UU yang Berlaku	55
3.2.10	Indikator Kinerja Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Berperan Aktif dalam Pengawasan Pemanfaatan SDKP	57
3.3	Analisis Akuntabilitas Kinerja	62
3.3.1	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran	62
3.3.2	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan dengan Pencapaian Sasaran	63
3.4	Analisis Dampak	65
B.	Realisasi Anggaran	70
3.5	Akuntabilitas Keuangan	70
BAB IV		
PENUTUP		
4.1	Capaian Kinerja IKU	75
4.2	Permasalahan	77
4.3	Upaya Tindak Lanjut.....	78

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	<i>Komposisi Pegawai PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Golongan</i>	7
Tabel 1.2	<i>Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional</i>	8
Tabel 1.3	<i>Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan</i>	9
Tabel 2.1	<i>IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022</i>	19
Tabel 2.2	<i>Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022</i>	20
Tabel 2.3	<i>Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022</i>	26
Tabel 3.1	<i>Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022</i>	30
Tabel 3.2	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022</i>	32
Tabel 3.3	<i>Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2017-2021 pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Kalimantan Tengah</i>	32
Tabel 3.4	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah</i>	35
Tabel 3.5	<i>Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2017-2021 pada Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) di Provinsi Kalimantan Tengah</i>	36
Tabel 3.6	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022</i>	37
Tabel 3.7	<i>Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2017-2021 pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah</i>	38
Tabel 3.8	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Kebutuhan Benih di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022</i>	41
Tabel 3.9	<i>Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2017-2021 pada Indikator Kinerja Jumlah Kebutuhan Benih di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022</i>	41
Tabel 3.10	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Angka Konsumsi Ikan Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah</i>	45

Tabel 3.11	<i>Perbandingan Pergerakan Nilai AKI Kalteng dan Nasional dari Tahun 2017-2021 pada Indikator Kinerja Angka Konsumsi Ikan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022</i>	46
Tabel 3.12	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022</i>	48
Tabel 3.13	<i>Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2017-2021 pada Indikator Kinerja Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022</i>	49
Tabel 3.14	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah</i>	52
Tabel 3.15	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022</i>	53
Tabel 3.16	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Ketentuan / UU yang Berlaku di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022</i>	56
Tabel 3.17	<i>Hasil Laporan Operasi Pengawasan di Perairan Kalimantan Tengah Tahun 2022</i>	56
Tabel 3.18	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang Berperan Aktif dalam Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah</i>	58
Tabel 3.19	<i>Jumlah POKMASWAS di Provinsi Kalimantan Tengah Pada Tahun 2022</i>	59
Tabel 3.20	<i>Perbandingan Jumlah Kasus Pelanggaran Bidang Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2021</i>	60
Tabel 3.21	<i>Perbandingan Indikator Pencapaian dari Target terhadap Realisasi Tahun 2022</i>	64
Tabel 3.22	<i>Kegiatan yang Secara Individual Tidak Efektif Namun Secara Bersama Efisien dalam Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2022..</i>	65
Tabel 3.23	<i>Kegiatan yang Tidak Efektif dan Tidak Efisien dalam Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2022</i>	65
Tabel 3.24	<i>Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022</i>	71
Tabel 3.25	<i>Perkembangan Daya Serap Keuangan Per Triwulan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022</i>	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	<i>Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah</i>	5
Gambar 1.2	<i>Diagram Komposisi PNS Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah</i>	6
Gambar 1.3	<i>Diagram Komposisi PNS Dislutkan Prov. Kalteng Menurut Golongan</i>	8
Gambar 1.4	<i>Diagram Komposisi PNS Dislutkan Prov. Kalteng Menurut Jabatan</i>	9
Gambar 1.5	<i>Diagram Komposisi PNS Dislutkan Prov. Kalteng Menurut Kualifikasi Pendidikan</i>	10
Gambar 1.6	<i>Diagram Komposisi PNS Dislutkan Prov. Kalteng Menurut Jenis Kelamin</i>	10
Gambar 3.1	<i>Grafik Trend/ Kecenderungan Produksi Perikanan Budidaya di Kalteng sejak Tahun 2017-2022</i>	38
Gambar 3.2	<i>Grafik Trend/ Kecenderungan Produksi Benih Ikan di Kalteng sejak Tahun 2017-2021</i>	42
Gambar 3.3	<i>Grafik Pergerakan AKI Kalteng dan AKI Nasional Tahun 2017-2021</i>	47
Gambar 3.4	<i>Efektifitas Kegiatan Terhadap Pencapaian Sasaran Tahun 2022 ..</i>	63
Gambar 3.5	<i>Efektifitas Kegiatan Terhadap Pencapaian Sasaran Tahun 2022 ..</i>	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : *Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022*
- Lampiran 2 : *Perjanjian Kinerja Tahun 2022*
- Lampiran 3 : *Rencana Aksi Pelaporan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Tahun 2022*
- Lampiran 4 : *Rencana Kinerja Tahunan 2023*
- Lampiran 5 : *Data Dukung Lainnya*

IKHTISAR EKSEKUTIF

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mencerminkan suatu organisasi yang akuntabel untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governace*). Akuntabilitas kinerja ini lebih difokuskan pada evaluasi kinerja yang bertujuan mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui analisis akuntabilitas kinerja yaitu :

- a. keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan tujuan, misi dan visi;
- b. keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan pencapaian sasaran.

Arah dan tujuan yang ingin dicapai atau dihasilkan dari pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- b. Peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
- c. Peningkatan kontribusi ekonomi (PDRB) dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; dan
- f. Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk (a) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan (b) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Maksud penyusunan LKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari penyusunan LKIP ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun, maka sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 6 (enam) program utama yang telah ditetapkan dengan berbagai kegiatannya masing-masing yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2022, antara lain meliputi :

- a. Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap, dengan indikator sasaran kinerja Jumlah produksi perikanan tangkap (ton), target 133.136,62;
- b. Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap, dengan indikator sasaran kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi), target 108,25;
- c. Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya, dengan indikator sasaran kinerja Jumlah produksi perikanan budidaya (ton), target 128.008,34;
- d. Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya, dengan indikator sasaran kinerja Jumlah kebutuhan benih (ribu ekor), target 69.820;

- e. Tercapainya Angka Konsumsi Ikan; dengan indikator sasaran kinerja Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun), target 55,81;
- f. Tercapainya Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan, dengan indikator sasaran kinerja Jumlah volume produk olahan hasil perikanan (ton/tahun), target 34.761,84
- g. Tercapainya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB, dengan indikator sasaran kinerja Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%), target 3,2;
- h. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang Optimal, dengan indikator sasaran kinerja Kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan pesisir (lokasi), target 2;
- i. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP), dengan indikator sasaran kinerja Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan / UU yang berlaku (%), target 85; dan
- j. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP), dengan indikator sasaran kinerja Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaat SDKP (kelompok), target 45.

Dari hasil penilaian terhadap 10 (sepuluh) indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran strategis, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah cukup baik, dengan 8 (delapan) indikator kategori **Sangat Baik** dan 2 (dua) indikator dalam kategori **Baik**.

Terdapat 2 (dua) indikator dengan kategori BAIK (hijau), yaitu pada indikator kinerja berikut ini: **Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap** dengan indikator *Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)* dengan tingkat capaiannya sebesar **89,61%**; dan **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang Optimal** dengan indikator *Kesesuaian pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)* dengan capaian sebesar **100,00 %**.

Sedangkan prestasi kinerja kategori SANGAT BAIK (biru) dicapai pada 8 (delapan) indikator kinerja berikut ini: **Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap** dengan indikator *Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)* sebesar **115,48%**; **Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya** dengan indikator *Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)* sebesar **101,31%**; **Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya** dengan indikator *Jumlah Kebutuhan Benih (ekor)* sebesar **101,00%**; **Tercapainya Angka Konsumsi Ikan** dengan indikator *Angka Konsumsi Ikan (AKI) (kg/kap/tahun)* sebesar **100,34%**; **Tercapainya Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan** dengan indikator *Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)* sebesar **101,30%**; **Tercapainya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB** dengan indikator *Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB* sebesar **142,81%**; **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)** dengan indikator *Persentase Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Ketentuan / UU yang berlaku (%)* sebesar **117,65%**; dan **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)** dengan indikator *Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang Berperan Aktif dalam Pengawasan Pemanfaatan SDKP (kelompok)* sebesar **448,89%**.

B. Realisasi Anggaran

Untuk penilaian kinerja keuangan terkait dukungan terhadap kegiatan strategis diukur melalui realisasi keuangan. Di tahun 2022 realisasi keuangan

terhadap program/ kegiatan terkait kegiatan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mencapai Rp.42.715.808.587,- (44,23%) dari pagu anggaran Rp.96.584.181.933,-.

C. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut

Permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja selama Tahun 2022, yaitu meliputi :

- a. Lemahnya data perikanan.
- b. Tingginya harga pakan ikan.
- c. Kualitas benih yang digunakan tidak menggunakan benih unggul.
- d. Terjadinya perubahan musim yang ekstrim.
- e. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap.
- f. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
- g. Pengaruh cuaca yang ekstrim sehingga mengakibatkan gelombang tinggi di laut, dimana mempengaruhi jumlah trip operasi penangkapan.
- h. Bahan bakar yang mahal, sulitnya mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi bagi nelayan, sehingga mengakibatkan berkurangnya trip penangkapan.
- i. Jumlah produksi produk olahan hasil perikanan tergantung pada hasil dari produksi perikanan budidaya dan tangkap.
- j. Keterbatasan modal untuk pengembangan usaha dari para pengolah yang sebagian dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
- k. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolah dan sebagian dari industri pengolah masih menggunakan peralatan yang tradisional.
- l. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan biaya operasional penyidik perikanan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan tindak pidana perikanan oleh masyarakat.
- m. Kurangnya SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.
- n. Tidak optimalnya pencapaian realisasi keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 yang disebabkan oleh tidak terealisasinya program Shrimp Estate karena penambahan anggaran dengan jumlah besar dan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka upaya tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pencapaian target indikator ke depan antara lain :

- a. Rehabilitasi/ pembangunan/ pengembangan pelabuhan perikanan.
- b. Mendorong percepatan operasional unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
- c. Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba.
- d. Meningkatkan penyediaan pakan murah melalui pengadaan mesin pakan ikan skala mini kepada kelompok pembudidaya.
- e. Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya.
- f. Pengembangan usaha pengolahan perikanan skala kecil, pengembangan diversifikasi produk olahan, pameran dan promosi produk hasil perikanan, serta ragam produk olahan bernilai tambah.
- g. Koordinasi antar lembaga pemerintah (pembentukan forum pengelola perairan lintas sektoral).
- h. Memperkuat payung hukum pengelolaan (Perda dan sosialisasi Perda).
- i. Penguatan/pembinaan dan pembentukan lembaga pengelola perairan ditingkat masyarakat.
- j. Peningkatan SDM (PPNS) pengawas perikanan dan peningkatan kualitas PPNS yang sudah ada.

- k. Penguatan lembaga adat dan kearifan lokal lainnya.
- l. Anggaran yang diperuntukkan bagi program shrimp estate yang tidak terealisasi di tahun 2022 akan dilanjutkan pelaksanaannya di tahun 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* (sah) demi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu pilar sebagai elemen dasar dari pemerintahan yang baik tersebut adalah Akuntabilitas, yang dalam perspektif Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Alat pertanggungjawaban tersebut adalah sebuah sistem yang diharuskan kepada sebuah organisasi untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), mengingat Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk (a) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan (b) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang

uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Sebagai acuan yang mengarahkan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut adalah dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) pembangunan jangka menengah yang disusun secara periode lima tahunan. Pada tahun 2022, sebagai acuan dalam perencanaan strategis program dan kegiatan di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026. Dalam dokumen perencanaan strategis tersebut diantaranya memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari penyusunan LKIP ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai salah satu unit organisasi perangkat kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT), penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT), penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT);
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur.

1.4 Susunan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah BAB XVII Pasal 428, susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat; terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset
- 3) Bidang Kelautan dan Pesisir
- 4) Bidang Perikanan Tangkap
- 5) Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran
- 6) Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Sejak tahun 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah mempunyai 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Keempat UPT yang telah ditetapkan tersebut terdiri dari :

1. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah;
2. UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah;
3. UPT Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah; dan
4. UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah.

Seluruh Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas masuk dalam klasifikasi kelas A dan dipimpin oleh Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada gambar berikut :

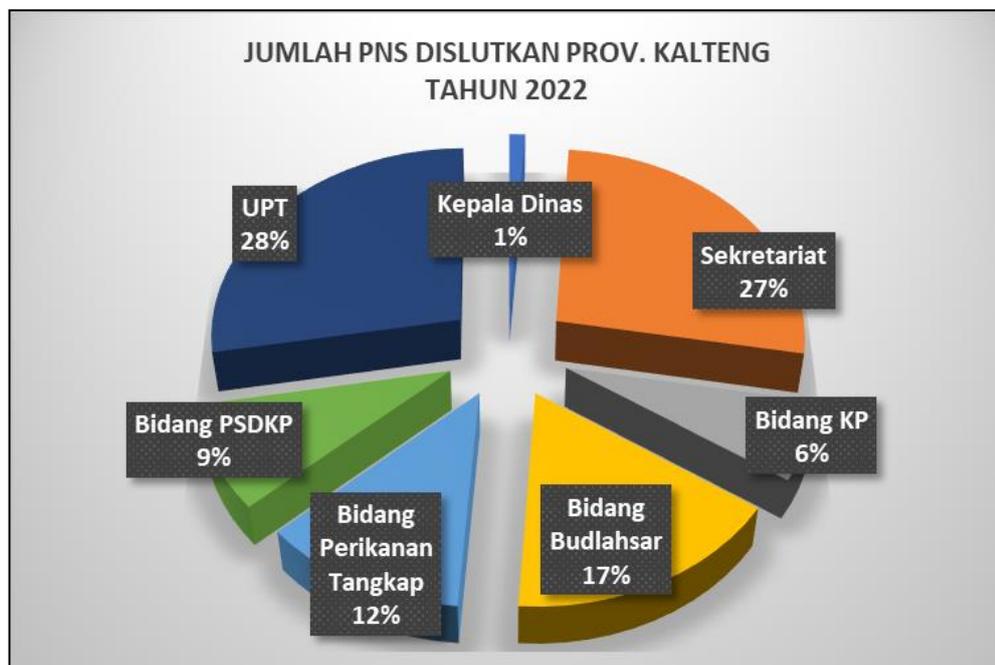


Gambar 1.1 *Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah*

1.4 Keadaan Personil dan Kepegawaian

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebagai berikut :

- a) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 mencapai 84 Orang dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 6 orang sehingga seluruh Pegawai berjumlah 90 orang dengan rincian sebagai berikut : Kepala Dinas 1 Orang; Sekretariat 24 Orang; Bidang Kelautan dan Pesisir (KP) 6 Orang; Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran (Budlhasar) 15 Orang; Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) 8 Orang; Bidang Perikanan Tangkap 11 Orang; dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) 25 Orang.



Gambar 1.2 Diagram Komposisi PNS Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah

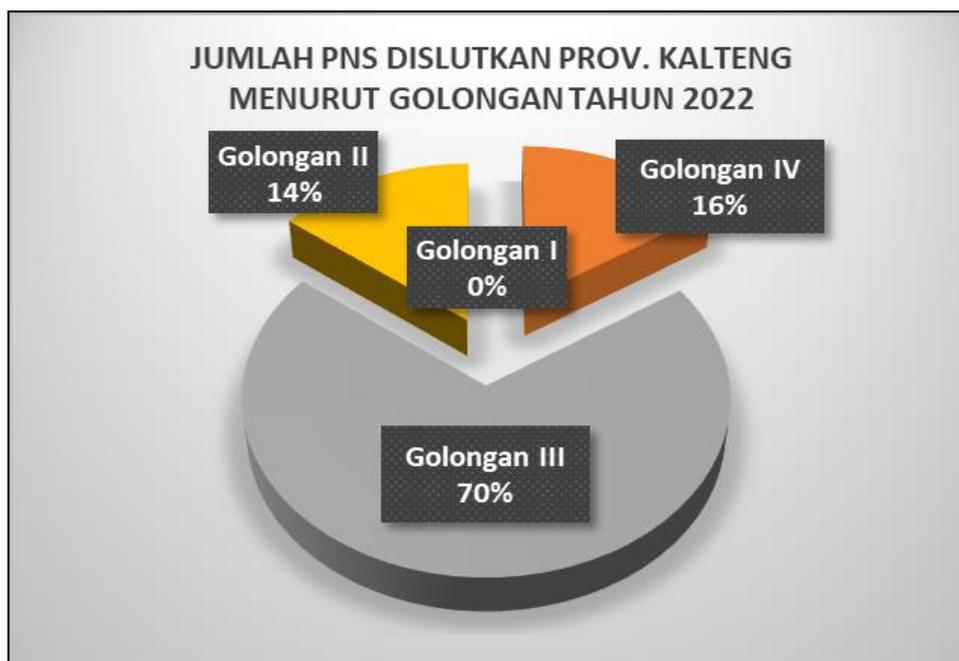
- b) Jika dilihat dari Gambar 1.2 di atas, jumlah PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak terdapat di UPT sebanyak 28% dari total jumlah pegawai Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah.
- c) Jumlah PNS yang ada di kantor dinas sebanyak 72% sedangkan yang ada di UPT sebanyak 28%.
- d) Jumlah PNS menurut golongan : Golongan IV sebanyak 13 Orang, Golongan III sebanyak 63 Orang, dan Golongan II sebanyak 14 Orang. Secara rinci, komposisi pegawai PNS dinas berdasarkan golongan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 *Komposisi Pegawai PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Golongan*

No	Pangkat dan Golongan		Jumlah		Total	Ket
			L	P		
1	I/d	Juru Muda	0	0	0	
Jumlah Golongan I			0	0	0	
2	II/a	Pengatur Muda	0	0	0	
3	II/b	Pengatur Muda Tk. I	2	0	2	
4	II/c	Pengatur	4	0	4	
5	II/d	Pengatur Tk. I	5	3	8	
Jumlah Golongan II			11	3	14	
6	III/a	Penata Muda	3	1	4	
7	III/b	Penata Muda Tk.I	5	7	12	
8	III/c	Penata	17	12	29	
9	III/d	Penata Tk. I	10	8	18	
Jumlah Golongan III			35	28	63	
10	IV/a	Pembina	3	5	8	
11	IV/b	Pembina Tk. I	2	2	4	
12	IV/c	Pembina Utama Muda	0	0	0	
13	IV/d	Pembina Utama Madya	1	0	1	
Jumlah Golongan IV			6	7	13	
Jumlah			52	38	90	

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian, 2022

- e) Dilihat pada tabel di atas menurut golongannya PNS Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak pada Golongan III yaitu sebesar 70%, sedangkan jumlah terkecil pada Golongan II sebesar 14%, dan kemudian Golongan IV sebesar 16%. Komposisi ini disajikan pada Diagram berikut.



Gambar 1.3 Diagram Komposisi PNS Dislutkan Prov. Kalteng Menurut Golongan

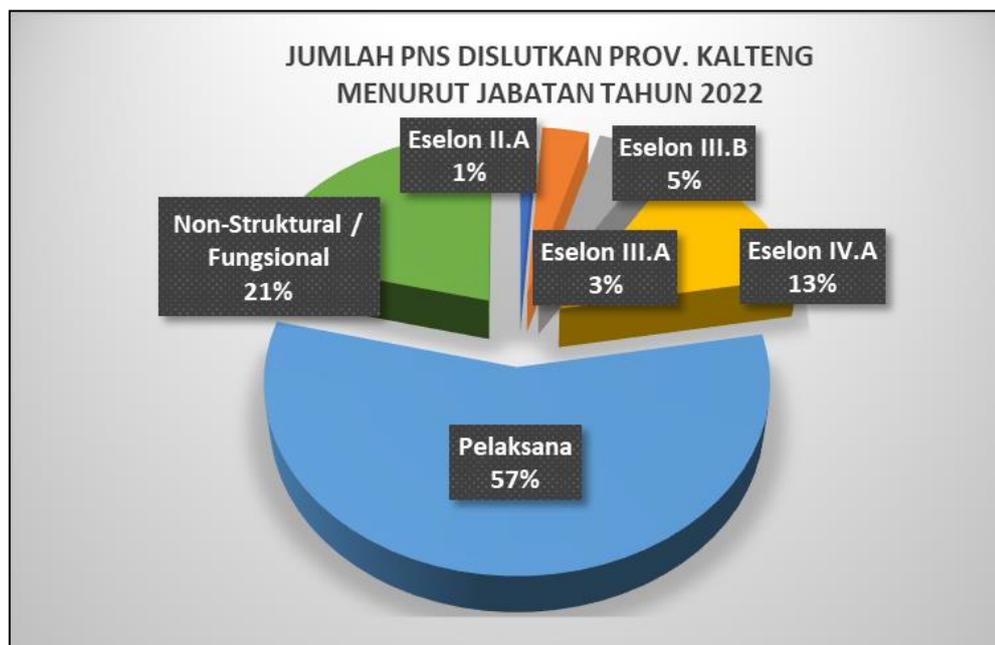
- f) Jumlah PNS Dislutkan Prov. Kalteng yang menduduki jabatan yaitu Eselon II sebanyak 1 Orang, jabatan Eselon III sebanyak 7 Orang, jabatan Eselon IV sebanyak 12 Orang, dan Pelaksana sebanyak 70 Orang yang terdiri dari 51 orang JFU (Pelaksana) dan 8 orang Fungsional (JFT).

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon II.A	1	0	1
2	Eselon III.A	2	1	3
3	Eselon III.B	2	2	4
4	Eselon IV.A	9	3	12
5	Pelaksana	28	23	51
6	Non-Struktural / Fungsional	10	9	19
JUMLAH		52	38	90

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian, 2022

- g) Dilihat pada tabel di atas berdasarkan jabatannya PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak pada jabatan Pelaksana yaitu sebesar 57%, sedangkan jumlah terkecil pada Eselon II.A dengan jabatan Kepala Dinas sebesar 1%, dan kemudian Golongan III.A atau Kepala Bidang sebesar 3% dan Kepala UPT sebesar 5%. Komposisi ini secara rinci disajikan pada Diagram berikut.



Gambar 1.4 Diagram Komposisi PNS Dislutkan Prov. Kalteng Menurut Jabatan

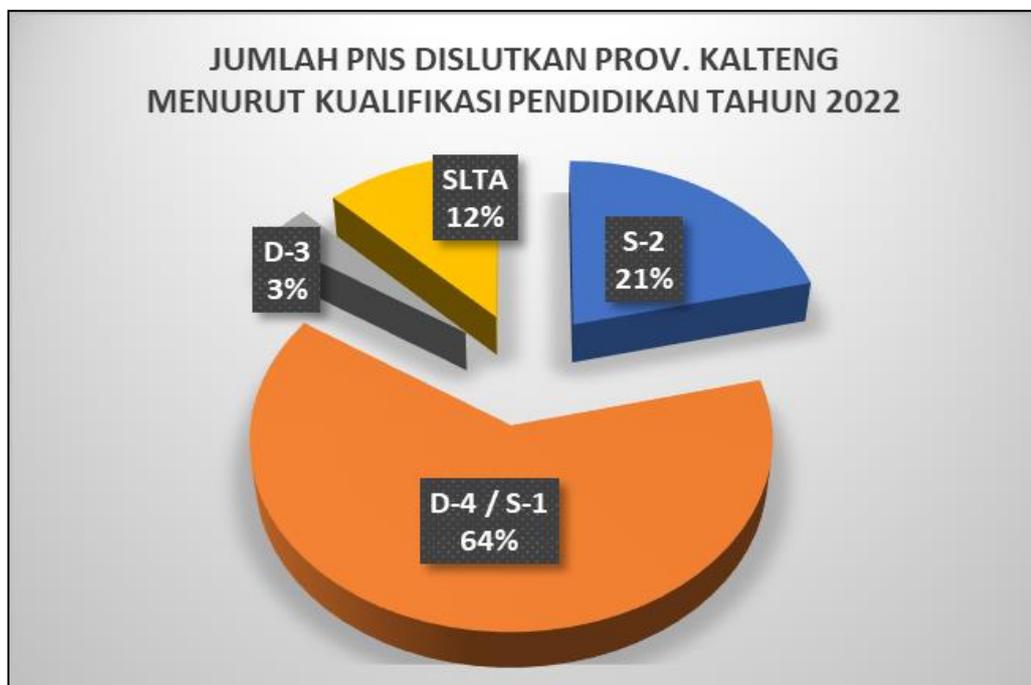
- h) Jumlah PNS menurut kualifikasi pendidikan yaitu S2 sebanyak 16 Orang, S1/D4 sebanyak 58 Orang, D3 sebanyak 5 Orang, dan SLTA/Sederajat sebanyak 9 Orang.

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total
		L	P	
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0	0	0
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	8	3	11
3	Diploma Satu (D-1)	0	0	0
4	Diploma Tiga (D-3)	2	1	3
5	Diploma Empat (D-4) / Sarjana (S-1)	35	22	57
6	Pascasarjana (S-2)	7	12	19
JUMLAH		52	38	90

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian, 2022

- i) Menurut tingkat pendidikannya, PNS Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak dengan tingkat pendidikan D-4 / S-1 mencapai 64%, diikuti dengan tingkat pendidikan S-2 sebesar 21% dan SLTA sebesar 12%. Sedangkan yang berlatar belakang pendidikan D3 yang paling sedikit yaitu 3%. Komposisi ini dapat dilihat pada Diagram berikut.



Gambar 1.5 Diagram Komposisi PNS Dislutkan Prov. Kalteng Menurut Kualifikasi Pendidikan

- j) Menurut jenis kelamin, PNS Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 52 orang atau 58% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan PNS perempuan sebanyak 38 orang atau 42%. Komposisi ini dapat dilihat pada Diagram berikut.



Gambar 1.6 Diagram Komposisi PNS Dislutkan Prov. Kalteng Menurut Jenis Kelamin

1.6 Sistematika Penyajian LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2022. Capaian Kinerja Tahun 2022 tersebut akan dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2022 sehingga hasilnya akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu satu tahun.

Adapun sistematika penyajian LKIP sebagai berikut :

- a) **Ikhtisar Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh LKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi latar belakang; maksud dan tujuan; kedudukan, tugas pokok dan fungsi; susunan struktur organisasi; dan keadaan personil dan kepegawain;
- c) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini berisi perencanaan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021;
- d) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
- e) **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja; dan
- f) **Lampiran**, pada lampiran disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2021-2026. Pada Tahun 2022 ini kegiatan-kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sudah menggunakan acuan berdasarkan visi misi dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2021-2022.

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan daerah Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2016-2021 adalah : **“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis”**.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

- Misi Kesatu : Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan.**
- Misi Kedua : Memperkuat Ketahanan Daerah dalam mengantisipasi Perubahan Global.**
- Misi Ketiga : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi.**
- Misi Keempat : Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing.**
- Misi Kelima : Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.**

Berdasarkan pembagian kewenangan prioritas pembangunan daerah melalui sektor yang ada, Dinas Kelautan dan Perikanan dihubungkan secara langsung kepada **Misi Kesatu Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang**

Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan yang dalam RPJMD dijelaskan bahwa terkait potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah berupa garis pantai sepanjang 750 km yang menghadap ke laut Jawa dan terdapat pada 7 (tujuh) kabupaten, yakni: Sukamara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas, dan tempat bagi para nelayan untuk mencari penghidupan, maka sumber daya air, pesisir dan pantai merupakan potensi penting dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah di masa depan. Potensi inilah yang harus dimanfaatkan secara maksimal dan membutuhkan suatu terobosan strategi yang tepat dalam membangun kemampuan kreativitas dan meningkatkan kemampuan inovasi pelaku usaha perikanan agar mampu tumbuh dan bersaing.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan, maka arah visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki konsistensi dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah yang Produktif, Berdaya Saing, Inovatif, Kolabratif dan Berorientasi pada penguatan Ekonomi Kerakyatan serta Pengelolaan Berkelanjutan”

Adapun Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas perikanan yang berbasis teknologi dan bernilai tambah tinggi, dengan tujuan:

- Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
- Peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan.
- Peningkatan kontribusi ekonomi (PDRB) dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan

2. Peningkatan Upaya Konservasi dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:

- Terjaganya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan yang berlaku.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi, dengan tujuan:

- Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dari pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2026.

Dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD, terdapat 5 (lima) tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (indikator : produksi perikanan budidaya dalam ton/tahun),
 - b. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (indikator : produksi perikanan tangkap dalam ton/tahun);
 - c. Meningkatnya Kebutuhan Benih (indikator : jumlah kebutuhan benih dalam ribu ekor).
2. Peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (indikator : jumlah volume produk olahan hasil perikanan dalam ton/tahun);
 - b. Meningkatnya Konsumsi Ikan (indikator : Tingkat Angka Konsumsi Ikan dalam kg/kapita/tahun).
3. Peningkatan kontribusi ekonomi (PDRB) dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Tujuan tersebut di capai dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (indikator : persentase kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB);
 - b. Meningkatnya Pendapatan Nelayan (indikator : Nilai Tukar NTN/NTBi).

4. Mengoptimalkan pengelolaan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran : Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (indikator : jumlah lokasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan pesisir dalam lokasi).
5. Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang Berlaku (indikator : persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan dan UU yang berlaku dalam %);
 - b. Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Kegiatan Pengawas SDKP (indikator : jumlah Kelompok Masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP dalam kelompok).
6. Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran :
 - a. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel (indikator : nilai SAKIP dalam huruf);
 - b. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi pelayanan Masyarakat (indikator : jumlah informasi publik yang disediakan oleh PPID dalam naskah).

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun, maka sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) program utama yang telah ditetapkan dengan berbagai kegiatannya masing-masing yang tercantum di dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2022, antara lain meliputi :

- a. Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap, dengan indikator sasaran kinerja Jumlah produksi perikanan tangkap (ton), target 133.136,62;
- b. Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap, dengan indikator sasaran kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi), target 108,25;
- c. Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya, dengan indikator sasaran kinerja Jumlah produksi perikanan budidaya (ton), target 128.008,34;
- d. Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya, dengan indikator sasaran kinerja Jumlah kebutuhan benih (ribu ekor), target 69.820;
- e. Tercapainya Angka Konsumsi Ikan; dengan indikator sasaran kinerja Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun), target 55,81;

- f. Tercapainya Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan, dengan indikator sasaran kinerja Jumlah volume produk olahan hasil perikanan (ton/tahun), target 34.761,84
- g. Tercapainya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB, dengan indikator sasaran kinerja Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%), target 3,2;
- h. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang Optimal, dengan indikator sasaran kinerja Kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan pesisir (lokasi), target 2;
- i. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP), dengan indikator sasaran kinerja Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan / UU yang berlaku (%), target 85;
- j. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP), dengan indikator sasaran kinerja Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaat SDKP (kelompok), target 45.

2.1.2 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

A. Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengembangan komoditas unggulan dan komoditas bernilai ekonomis tinggi air tawar, payau, dan laut; pembinaan kelembagaan pelaku usaha; pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya air payau, air tawar, dan air laut antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, jalan produksi dan instalasi; pembinaan kelompok pembudidaya ikan,
- b. Peningkatan kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap; optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan

- perikanan; mengembangkan armada perikanan tangkap yang kompetitif dan optimal; peningkatan kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap,
- c. Penyediaan input produksi yang efisien (induk, benih, obat, pakan, peralatan); Pembinaan Unit Perbenihan Rakyat
 - d. Peningkatan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan produk hasil Kelautan dan Perikanan; pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju *zero waste*; penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan pasca panen, dan peralatan pengolahan,
 - e. Promosi peningkatan konsumsi ikan,
 - f. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap; peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Budidaya; peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Pengolahan Pemasaran Perikanan,
 - g. Manajemen usaha penangkapan ikan melalui pendekatan *supply* (Sumber Daya Ikan) dan *demand* (Hasil Penangkapan Ikan),
 - h. Peningkatan manajemen dan pemanfaatan ruang laut dan pesisir secara berkelanjutan, rehabilitasi bakau (mangrove), dan terumbu karang; penguatan jejaring, kemitraan/kerja sama, dan peran Dinas dalam konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut,
 - i. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP,
 - j. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan,
 - k. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

B. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Arah Kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah adalah :

- a. Bantuan Benih Ikan dan Pakan Ikan, Fasilitasi dan sosialisasi sertifikasi lahan pembudidayaan ikan, Food Estate, pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan, seperti: Kluster Tambak Udang Vaname (*Shrimp Estate*), Penerapan teknologi adaptif dan efisien, seperti: Bioflok, Pengembangan pakan ikan mandiri yang murah dan berkualitas menggunakan bahan baku lokal, Pengembangan komoditas unggulan (ikan lokal) untuk ketahanan pangan, Mendorong kelompok pembudidaya ikan untuk membentuk kelembagaan yang berbadan hukum, Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- b. Perbaiki, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait, Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan, Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan, Penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan, Penguatan UPT perikanan tangkap;
- c. Modernisasi sarana produksi induk dan benih, Penguatan unit produksi di UPT, Peningkatan kualitas induk ikan, Sertifikasi Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB);
- d. Fasilitasi kemitraan usaha, Pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan, Fasilitasi akses pembiayaan, Penguatan pengadaan dan penyimpanan hasil kelautan dan perikanan, Fasilitasi sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan dan pengolahan, Pembinaan mutu pada UPI;
- e. Safari Gemarikan, Pemberian paket Gemarikan (makanan berbahan baku ikan), Lomba masak berbahan baku ikan, Iklan layanan masyarakat dan pameran produk perikanan;
- f. Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan;
- g. Pemberdayaan nelayan termasuk kelompok nelayan perempuan, diversifikasi usaha nelayan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju,

- bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, perlindungan HAM Perikanan, Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;
- h. Pelaksanaan pemberian izin oleh pemerintah provinsi, termasuk adanya pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang oleh Menteri, Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut antara pemangku kepentingan berupa sosialisasi, pendampingan, identifikasi pemanfaatan eksisting, dan koordinasi, Fasilitasi dan/atau operasional pemanfaatan kawasan konservasi, Penyusunan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi, Peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi;
 - i. Meningkatkan kesadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab, Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir;
 - j. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor, Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS, Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar;
 - k. Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan tata laksana, Penataan sistem manajemen SDM aparatur, Penguatan akuntabilitas kinerja.

2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai ukuran keberhasilan, tertuang pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1 *IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

NO.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)
		Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)
		Jumlah Kebutuhan Benih (ekor)
3	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan (AKI)(kg/kap/tahun)

NO.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA
4	Tercapainya Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)
5	Tercapainya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang Optimal	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)
7	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)
		Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)

Sumber : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun. Untuk tahun 2022, rencana kinerja tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah diuraikan pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

NO.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	133.136,62
		Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	108,25
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	128.008,34
		Jumlah Kebutuhan Benih (ekor)	69.820
3	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan (AKI)(kg/kap/tahun)	55,81

NO.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Tercapainya Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	34.761,84
5	Tercapainya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	3,2
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang Optimal	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	2
7	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	85
		Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	45

Sumber : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan target-target sasaran indikator kinerja utama (IKU) yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah disepakati. Penetapan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 diimplementasikan ke dalam 6 (enam) program, sebagai berikut :

(1) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertatanya dan dimanfaatkannya wilayah perairan laut, wilayah pesisir dan wilayah perairan umum daratan dengan sasaran peningkatan persentase pendayagunaan sumber daya laut, pesisir dan perairan umum daratan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi:
 - 1) Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat.

- b. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi:
 - 1) Penetapan persyaratan dan Prosedur penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.
- c. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:
 - 1) Pemberian Pendampingan, kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
Penanggung jawab program tersebut adalah Bidang Kelautan dan Pesisir dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2022 sebesar Rp.445.000.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program tetap berada diangka Rp.445.000.000,-.

(2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan dalam negeri dan ekspor, serta menyerap tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut;
 - 1) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut.
 - 2) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3) Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - 4) Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Penanggung jawab program tersebut adalah Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2022 sebesar Rp.3.577.480.400,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp.62.246.659.924,- atau terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.58.669.179.524,-.

(3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan sasaran wilayah perairan bebas *illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing* serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil:
 - 1) Pengawasan Pemanfaatan Ruang laut sampai dengan 12 Mil.
 - 2) Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil.
 - 3) Penumbuhan dan pengembangan kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Penanggung jawab program tersebut adalah Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2022 sebesar Rp.435.503.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi sebesar Rp.462.503.000,- atau terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.25.000.000,-.

(4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tujuan program ini adalah meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, nilai tambah produk perikanan, investasi, serta distribusi dan akses pemasaran hasil perikanan, dengan sasaran peningkatan volume dan nilai ekspor hasil perikanan serta peningkatan volume produk olahan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran program tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar:
 - 1) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.

Penanggung jawab program tersebut adalah Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran. Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2022 sebesar Rp.147.500.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp.1.089.561.688,-, atau terdapat penambahan sebesar Rp.942.061.688,-.

(5) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya

penangkapan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil:
 - 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan.
 - 2) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap.
 - 3) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
- b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:
 - 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan.
- c. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:
 - 1) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai Dengan 10 GT.
- d. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi:
 - 1) Penyediaan sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan.
 - 2) Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan.

Penanggung jawab program tersebut adalah Bidang Perikanan Tangkap dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2022 sebesar Rp.13.947.800.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp.14.652.800.000,-, atau terdapat penambahan sebesar Rp.705.000.000,-.

(6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini bertujuan untuk merencanakan kegiatan pembangunan secara terpadu, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pembangunan serta memenuhi kebutuhan sarana prasarana aparatur dengan sasaran peningkatan pelayanan prima dan kinerja instansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - 4) Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD.

- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
- 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - 3) Pelaksanaan dan Penatausahaan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
 - 2) Pengamanan barang Milik Daerah SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penilaian barang Milik Daerah SKPD.
 - 4) Pembinaan, pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Penyediaan peralatan Rumah Tangga.
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- 1) Penyediaan Jasa Surat-Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 2) Pemeliharaan Mebel.
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 4) Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 yang telah disepakati dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3 *Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	133.136,62
		Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	108,25
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	128.008,34
		Jumlah Kebutuhan Benih (ekor)	69.820
3	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan (AKI)(kg/kap/tahun)	55,81
4	Tercapainya Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	34.761,84
5	Tercapainya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	3,2
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang Optimal	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	2
7	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	85
		Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	45

Sumber : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

NO	PROGRAM	ANGGARAN 2022		KETERANGAN
		SEBELUM (Rp.)	SESUDAH (Rp.)	
1.	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	445.000.000	445.000.000	Perubahan Anggaran
2.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.577.480.400	62.246.659.924	Perubahan Anggaran
3.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	437.503.000	462.503.000	Perubahan Anggaran
4.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	147.500.000	1.089.561.688	Perubahan Anggaran
5.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	13.947.800.000	14.652.800.000	Perubahan Anggaran
6.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.801.055.600	17.687.667.321	Perubahan Anggaran
J U M L A H		35.356.339.000	96.584.191.933	

Sumber : DPPA Dinas Kelautan dan Perikanan 2022

Jumlah anggaran APBD untuk program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis Tahun 2022 sebelum perubahan berjumlah Rp.35.356.339.000,- dan setelah perubahan anggaran berjumlah Rp.96.584.191.933,- atau terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.886.611.721,- atau 173,17%.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Media pertanggung jawaban tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Media pertanggungjawaban tersebut meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam mengukur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan tahun 2022 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu input, output, dan outcome. Pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam tahun 2022 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin.

3.1.1 Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- ✓ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana Realisasi}} \times 100\%$$

- ✓ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana Realisasi}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

No.	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1.	Sangat Baik	>100	Biru
2.	Baik	80-100	Hijau
3.	Cukup	50-79	Kuning
4.	Kurang	<49	Merah

3.1.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator keluaran dan hasil (*outcome*).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir pengukuran kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah seperti pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 *Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

NO.	SASARAN RPJMD/RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	133.136,62	153.747,57*	115,48	Sangat Baik
		Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	108,25	97,00	89,61	Baik
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	128.008,34	129.685,25*	101,31	Sangat Baik
		Jumlah Kebutuhan Benih (ekor)	69.820	70.517*	101,00	Sangat Baik
3	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan (AKI)(kg/kap/tahun)	55,81	56,00*	100,34	Sangat Baik
4	Tercapainya Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	34.761,84	35.213,74*	101,30	Sangat Baik
5	Tercapainya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	3,2	4,57	142,81	Sangat Baik
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang Optimal	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	2	2	100,00	Baik

NO.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
7	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	85	100	117,65	Sangat Baik
		Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	45	202	448,89	Sangat Baik

Keterangan :

* : merupakan angka sangat sementara yang diolah berdasarkan data dari kabupaten/kota (belum melakukan validasi semester II Tahun 2022).

3.2 Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi terhadap target yang ditetapkan, kendala / masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun, maka ditetapkan 7 (tujuh) sasaran, yang mengandung 10 (sepuluh) indikator sasaran yang ingin dicapai di bidang kelautan dan perikanan pada Tahun 2022. Untuk mencapai 10 (sepuluh) indikator sasaran tersebut, dilaksanakan melalui 6 (enam) program, dimana di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) kegiatan pokok dan 50 (Lima puluh) sub-kegiatan.

Pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian sasaran sebagaimana tertera pada tabel di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap

3.2.1 Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada pencapaian jumlah produksi perikanan tangkap. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan 4 (empat) kegiatan pokok dan 7 (tujuh) sub-kegiatan. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp.13.947.800.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp.14.652.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.14.286.567.284,- atau 97,50%.

Capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No.	SASARAN RPJMD/RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	133.136,62	153.747,57*	115,48	Sangat Baik

Keterangan :

* : merupakan angka realisasi sangat sementara tahun 2022 (belum validasi)

Dilihat dari tabel 3.2. di atas, dapat dilihat bahwa capaian pada Tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan. Produksi perikanan tangkap yang ditargetkan sebesar 133.136,62 ton, berhasil direalisasikan sebesar 153.747,57 ton atau 115,48%.

Apabila dibandingkan dengan capaian hasil tangkapan dari Tahun 2017-2021, maka terjadi kenaikan rata-rata jumlah produksi hasil tangkapan yakni sebesar 7,83% per tahun seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3 *Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2017 - 2021 pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Kalimantan Tengah*

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Ton)					Kenaikan Rata-Rata per Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Produksi Tangkap (Ton)	113.194,52	132.687,78	149.725,38	154.266,62	151.510,52	7,83

Pencapaian kinerja **IKU-1** pada **Sasaran-1** Tahun 2022 dinilai **SANGAT BAIK**. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi peningkatan produksi tangkap pada tahun 2022 menjadi 153.747,57 ton dari 151.510,52 ton atau meningkat sebesar 1,48%. Upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan dan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap serta penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap dalam rangka pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil; penyediaan data dan informasi sumber daya ikan dalam rangka pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan serta pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan dalam rangka penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.

Antara Sasaran RPJMD/Renstra Tahun 2022 dengan IKU Tahun 2022 haruslah saling mendukung dan sinergi sehingga dapat meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah. Pencapaian IKU ini pada Tahun 2022 memiliki tantangan yang cukup berat, mengingat :

1. Amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyerahkan pengelolaan ruang laut mulai 0 sampai dengan 12 mil laut menjadi kewenangan provinsi. Sebagai akibat penerapan aturan ini, provinsi masih harus menyesuaikan diri dengan berbagai bentuk pelimpahan kewenangan; personil, sarpras, dan wilayah kerja; salah satu diantaranya adalah keberadaan anggaran dan sumberdaya manusia yang difokuskan pada pelayanan kepada nelayan. Untuk itu, perlu adanya peningkatan baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia dengan menitikberatkan pada pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Seruyan. Saat ini, kendala-kendala ini diupayakan agar dapat segera diatasi dan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan terutama yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat nelayan.
2. Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang Satu Data atau dikenal dengan istilah *One Data*, yang mengharuskan setiap data yang dirilis dan digunakan pemerintah adalah data resmi yang dikeluarkan oleh KKP.

Sampai dengan saat penyusunan LKIP ini, data tahun 2022 dimaksud belum bisa dipublikasikan sehingga data yang digunakan adalah data berupa *angka sangat sementara* berdasarkan hasil validasi data statistik tingkat nasional pada semester 1 yang lalu dan estimasi keseluruhan dari data semester 2 yang terkumpul dari kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah dan belum di validasi secara nasional.

Selain beberapa faktor yang bersifat umum terkait upaya pencapaian IKU, terdapat faktor penghambat antara lain :

- (a) Lemahnya data perikanan, khususnya untuk data perikanan tangkap. Hingga saat ini, data perikanan tangkap diperoleh dari data survei sampel desa perikanan. Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa tempat-tempat pendataan ikan (Tempat Pelelangan Ikan/TPI) di beberapa daerah hampir tidak ada atau tidak berfungsi selayaknya tempat pelelangan ikan. Kalau pun ada, fungsi TPI tidak berperan sehingga mengakibatkan masyarakat nelayan terjebak permainan tengkulak. Dengan demikian, TPI yang juga berfungsi sebagai pencatat pendaratan ikan tidak berperan sebagaimana mestinya sehingga mempengaruhi keakuratan dan akuntabilitas data;
- (b) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap, terutama armada penangkapan ikan di perairan laut sebagian besar masih berukuran < 5 GT sehingga trip penangkapan tidak terlalu lama dan luas jangkauan nelayan melaut tidak terlalu jauh. Selain itu, pelabuhan perikanan masih belum mampu menjadi sentra aktifitas nelayan, dikarenakan masih belum lengkapnya fasilitas kebutuhan nelayan pada areal pelabuhan;
- (c) Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, menyebabkan rusaknya habitat ikan dan sumberdaya ikan semakin menurun karena eksploitasi berlebih terutama pada perairan umum daratan;
- (d) Bahan bakar yang mahal, sulitnya mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi bagi nelayan, sehingga mengakibatkan berkurangnya trip penangkapan; dan
- (e) Walaupun pada tahun 2022 pandemi covid-19 telah berangsur-angsur hilang namun terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia yang juga berimbas kepada nelayan di Kalimantan Tengah masih membatasi ruang gerak nelayan untuk dapat beraktivitas seperti biasa dalam melakukan penangkapan ikan.

Berdasarkan analisa terhadap beberapa permasalahan di atas, terdapat beberapa rekomendasi solusi yang jangka pendek dapat dilaksanakan :

- a. Optimalisasi fungsi pelabuhan-pelabuhan perikanan di Kalteng. Pelabuhan perikanan memegang peranan penting pada sektor perikanan tangkap di laut. Ketersediaan kebutuhan nelayan dan kewajiban pengurusan dokumen kapal dan berlayar pada pelabuhan perikanan akan memberikan kemudahan pelayanan terhadap nelayan. Jika hal ini dimaksimalkan, maka penerapan kebijakan pemerintah, data base penangkapan, dan pengelolaan perikanan tangkap laut dapat dilaksanakan melalui fungsi kepelabuhanan perikanan.
- b. Menggerakkan fungsi pengelolaan perijinan seirama dengan pengawasan, sehingga diharapkan masyarakat yang teridentifikasi kurang dalam perijinan dapat terlayani segera.
- c. Mengoptimalkan Petugas Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) yang ada di pelabuhan perikanan agar dapat melakukan pencatatan hasil tangkapan nelayan secara akurat dan tepat.
- d. Memberikan pelayanan konsultasi bagi nelayan melalui UPT yang ada di kabupaten secara online serta memberikan penyuluhan dan pendampingan terkait kegiatan perikanan bagi pelaku usaha.

3.2.2 Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang nilainya didapatkan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan sasaran ini maka dilakukan melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah*

No.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	108,25	97,00	89,61	Baik

Dari tabel 3.4 di atas dapat diketahui bahwa Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2022 mencapai 97,00 atau 89,61% dari target 2022 sebesar 108,25. Capaian kinerja ini dinilai BAIK.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan rata-rata per tahun Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 0,21% seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5 *Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2020-2021 pada Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) di Provinsi Kalimantan Tengah*

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Kenaikan Rata-Rata per Tahun (%)
	2020	2021	
Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	101,91	102,12	0,21

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan nelayan di pedesaan pada tahun dan bulan tertentu dibandingkan dengan tahun dasarnya. NTN dapat menjadi alat ukur kemampuan tukar barang-barang yang dihasilkan nelayan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan produksi. NTN adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib), yang dinyatakan dalam persentase. NTN lebih dari 100 artinya nelayan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya, atau mengalami surplus. NTN kurang dari 100 berarti bahwa pengeluaran nelayan untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi lebih tinggi daripada pendapatan hasil usahanya. Sedangkan NTN sama dengan 100 artinya bahwa pendapatan hasil usaha sama dengan pengeluaran untuk biaya konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksi.

Dilihat dari capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) di Kalimantan Tengah tahun 2022 nilainya belum mencapai 100 yang berarti bahwa nelayan di Kalimantan Tengah memiliki pengeluaran konsumsi rumah tangga dan biaya produksi lebih tinggi daripada pendapatan hasil usahanya. Sehingga dapat diasumsikan bahwa rata-rata nelayan di Kalimantan Tengah mulai mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Agar pendapatan usaha nelayan dapat lebih baik atau lebih tinggi daripada pengeluarannya maka perlu juga didukung kegiatan peningkatan sarana penangkapan nelayan perairan laut dan perairan umum daratan, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan, serta peningkatan keterampilan usaha nelayan.

SASARAN STRATEGIS 2

Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya

3.2.3 Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada pencapaian jumlah produksi perikanan budidaya, khususnya daging ikan untuk dikonsumsi. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan 1 (satu) kegiatan pokok dan 4 (empat) sub-kegiatan, yaitu penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut, penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota, penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota, pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengelolaan perikanan budidaya.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp.3.577.480.400,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp.62.246.659.924,- dengan realisasi sebesar Rp.11.368.701.406,- atau 18,26%.

Capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No.	SASARAN RPJMD/RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	128.008,34	129.685,25*	101,31	Sangat Baik

Keterangan :

* : merupakan angka realisasi sangat sementara tahun 2022 (belum validasi)

Dilihat dari Tabel 3.6 di atas, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2022 telah melampaui target yang telah ditetapkan, kategori pencapaian adalah **SANGAT BAIK**. Produksi perikanan budidaya yang ditargetkan sebesar 128.008,34 ton mampu terealisasi 129.685,25 ton atau sebesar 101,31%.

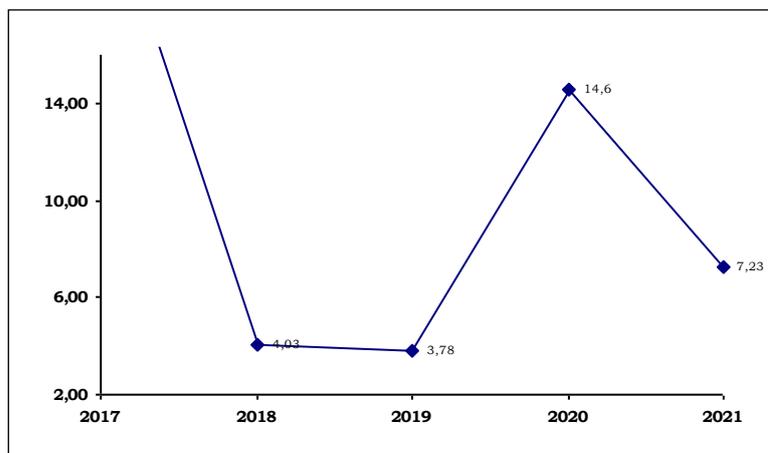
Apabila capaian produksi perikanan budidaya tahun 2022 ini dibandingkan dengan capaian produksi perikanan budidaya Tahun 2021 sebesar 120.936,60 ton dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan produksi sebesar 7,23%. Begitu pula bila dilihat dari segi kategori capaian kinerja, tahun 2022 mampu melebihi target capaian kinerja dan memperoleh kategori Sangat Baik.

Berdasarkan data tahunan statistik, sejak Tahun 2017-2021 terjadi kenaikan rata-rata jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 6,5%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7 *Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2017 - 2021 pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah*

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Ton)					Kenaikan Rata-Rata per Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Produksi Budidaya (Ton)	94.346,27	98.151,74	101.857,32	116.729,40	120.936,60	6,50

Namun, apabila dilakukan analisa kenaikan produksi setiap tahunnya, puncak kenaikan produksi ada di Tahun 2020, yaitu kenaikan sebesar 14,6% dibandingkan dari Tahun 2019. Secara grafis, trend pergerakan kenaikan/penurunan produksi perikanan budidaya dari Tahun 2017-2021 disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 3.1 *Grafik Trend / Kecenderungan Produksi Perikanan Budidaya di Kalteng sejak Tahun 2017-2022*

Kondisi ini memerlukan analisa lebih lanjut untuk ditentukan permasalahannya, namun kondisi perikanan budidaya di Kalimantan Tengah yang masih menggunakan metode ekstensifikasi dan minim intensifikasi dengan penerapan teknologi terbaru diperkirakan menjadi salah satu alasan peningkatan produksi tidak berjalan naik secara linier.

Secara umum, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian secara maksimal pada indikator kinerja ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Perluasan kawasan dan usaha budidaya melalui intensifikasi usaha belum maksimal, sehingga kegiatan budidaya menjadi terkesan padat modal dan resiko tinggi, sehingga perkembangannya cenderung lambat dibandingkan dengan sektor penangkapan ikan di laut;
- b. Belum tersedianya pabrik pakan atau gudang pakan skala besar di wilayah Kalteng. Hal ini berakibat pada tingginya harga pakan ikan, yang kemudian mengakibatkan biaya produksi tinggi, dan berdampak pada tidak mampunya bersaing harga ikan pembudidaya Kalteng dengan ikan yang berasal dari luar Kalteng;
- c. Masih cukup rendahnya kemampuan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan dalam memproduksi benih berkualitas yang kemudian berdampak pada sangat tergantungnya pembudidaya lokal kepada pembenih yang berasal dari luar Kalteng, yang kembali berpengaruh pada tingginya biaya produksi; dan
- d. Masih rendahnya kesadaran dan penerapan teknologi terbaru dalam pembudidayaan ikan, yang kemudian mengakibatkan rendahnya kemampuan pembudidaya dalam mencegah dan mengatasi perubahan gejala alam dan serangan penyakit ikan khususnya pada kawasan budidaya di Daerah Aliran Sungai (DAS);
- e. Terjadinya pandemic covid-19 selama dua tahun terakhir juga secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas pembudidaya dalam melakukan budidaya ikan karena adanya pembatasan kegiatan.
- f. Adanya penambahan anggaran dengan jumlah besar pada kegiatan Shrimp Estate di akhir periode tahun 2022 saat perubahan anggaran sehingga pada waktu yang ditargetkan realisasi fisik maupun keuangan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Dari permasalahan tersebut di atas, rekomendasi yang dapat secara cepat diaplikasikan dalam rangka peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya, antara lain :

- a. Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba yang disertai dengan penerapan teknologi terbaru yang memungkinkan intensifikasi budidaya perikanan atau melalui *pilot project* kelompok binaan pembudidaya handal;
- b. Pengadaan kolam sistem Bioflok Lengkap (terpasang);
- c. Meningkatkan upaya penyediaan pakan kepada pembudidaya ikan melalui bantuan pakan ikan kepada kelompok pembudidaya yang sudah diidentifikasi mampu menjadi contoh bagi pembudidaya lainnya;
- d. Pemberian bantuan benih ikan kepada kelompok pembudidaya ikan dan lembaga keagamaan sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan benih bermutu sehingga mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya, antara lain benih ikan Betok dan ikan Jelawat;
- e. Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya melalui sosialisasi dan temu usaha, serta menganjurkan pembudidaya untuk menggunakan benih ikan yang telah bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari UPTD/UPR; dan
- f. Jalinan intensif kerjasama pemerintah daerah dan sektor permodalan untuk mampu memberikan pendanaan kredit lunak kepada pembudidaya potensial di Kalteng, salah satunya dengan melibatkan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki tugas utama menyalurkan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang berdampingan kepada pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan. Melalui BLU-LPMUKP KKP ini, pada tahun 2021 telah disalurkan pinjaman/pembiayaan BLU-LPMUKP yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Tengah kepada 8 (delapan) pelaku usaha kelautan dan perikanan sebagai perwakilan dari pelaku usaha kelautan dan perikanan Kalteng, yang berasal dari Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kapuas sebanyak 5 pelaku usaha, serta Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur dan Seruyan sebanyak 3 pelaku usaha. Pada tahun 2022, diperkuat dengan adanya Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPU KP) yang memberikan penadampingan bagi pelaku usaha perikanan dalam memanfaatkan layanan GISELA atau Gerai Investasi dan Layanan Usaha,

merupakan layanan yang disediakan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan kapasitas dan daya saing usaha.

- g. Anggaran tahun 2022 yang menjadi SILVA pada kegiatan Shrimp Estate digeser ke APBD 2023.

3.2.4 Indikator Kinerja Jumlah Kebutuhan Benih

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan jumlah benih ikan yang dibutuhkan selama jangka waktu satu tahun di Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan 1 (satu) kegiatan pokok dan 4 (empat) sub-kegiatan.

Capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Kebutuhan Benih di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah kebutuhan benih (ekor)	69.820	70.517*	101,00	Sangat Baik

Keterangan :

* : merupakan angka realisasi sangat sementara tahun 2022 (belum validasi)

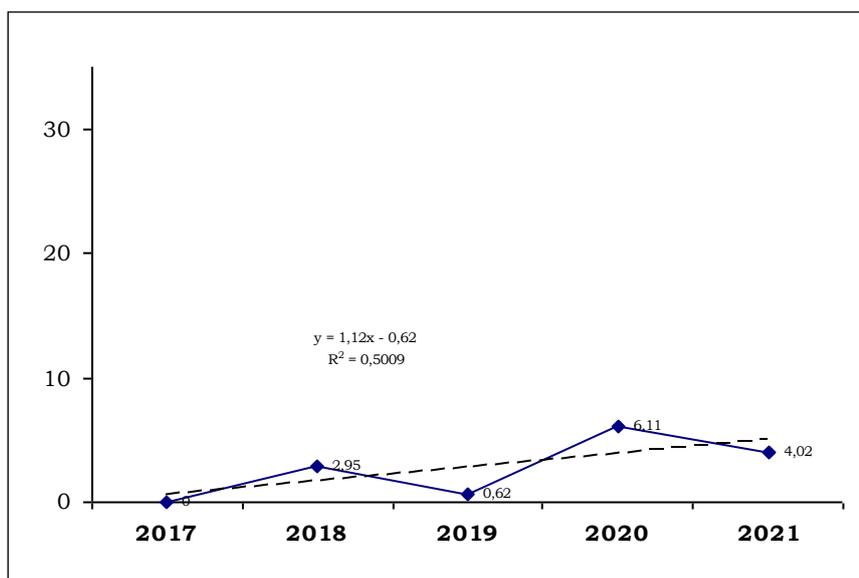
Dilihat dari Tabel 3.6 di atas, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2022 telah melampaui capaian yang telah ditetapkan atau mencapai kategori **SANGAT BAIK**.

Berdasarkan data tahunan statistik, sejak Tahun 2017-2021 terjadi kenaikan rata-rata jumlah benih perikanan budidaya sebesar 3,43%.

Tabel 3.9 *Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2017 - 2021 pada Indikator Kinerja Jumlah Kebutuhan Benih di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Ribuan Ekor)					Kenaikan Rata-Rata per Tahun
	2017	2018	2019	2020	2021	(%)
Jumlah Kebutuhan Benih	60.180	61.956	62.342	66.154	68.812	3,43

Secara *trend* / kecenderungan produksi benih ikan di Kalimantan Tengah berdasarkan data di atas menunjukkan peningkatan walaupun masih sangat kecil. Peningkatan dimaksud disajikan pada gambar grafik berikut ini.



Gambar 3.2 *Grafik Trend / Kecenderungan Produksi Benih Ikan di Kalteng sejak Tahun 2017-2021*

Peningkatan capaian kinerja pada indikator Jumlah Kebutuhan Benih di Provinsi Kalimantan Tengah ini dimulai sejak tahun 2013 dan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya sampai pada tahun 2018 sebesar 61.956.000 ekor benih. Pada tahun 2019, produksi benih ikan mencapai 62.342.000 ekor dan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,62%. Hal ini dikarenakan adanya kemarau panjang yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan sehingga mempengaruhi kondisi perairan dan kondisi indukan yang digunakan. Dengan adanya kondisi tersebut maka benih ikan yang dihasilkan tidak maksimal dan sedikit melampaui target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan produksi benih dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 6,11%.

Apabila dianalisa hubungan produksi benih terhadap produksi perikanan budidaya, terdapat hubungan yang cukup erat, mengingat salah satu faktor penentu keberhasilan produksi perikanan budidaya adalah ketersediaan benih dari hasil produksi lokal Kalimantan Tengah. Jika kebutuhan benih di lokal Kalteng mencukupi, maka ketergantungan terhadap benih yang berasal dari luar Kalteng akan menurun, begitu pula logika sebaliknya. UPT pemerintah dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang ada sekarang ini dalam memenuhi permintaan

pasar dalam daerah secara tidak langsung mempengaruhi keberhasilan produksi perikanan budidaya secara umum.

Hal inipun didukung dengan adanya ketersediaan benih yang bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dan didukung dengan sosialisasi CBIB (Cara Budidaya IKan yang Baik).

Secara umum, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian secara maksimal dalam pencapaian kinerja produksi perikanan budidaya, yaitu :

- a. Perluasan kawasan dan usaha budidaya melalui intensifikasi usaha belum maksimal, sehingga kegiatan budidaya menjadi terkesan padat modal dan resiko tinggi, sehingga perkembangannya cenderung lambat dibandingkan dengan sektor penangkapan ikan di laut;
- b. Belum tersedianya pabrik pakan atau gudang pakan skala besar di wilayah Kalteng. Hal ini berakibat pada tingginya harga pakan ikan, yang kemudian mengakibatkan biaya produksi tinggi, dan berdampak pada tidak mampunya bersaing harga ikan pembudidaya Kalteng dengan ikan yang berasal dari luar Kalteng;
- c. Masih cukup rendahnya kemampuan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan dalam memproduksi benih berkualitas yang kemudian berdampak pada sangat tergantungnya pembudidaya lokal kepada pembenih yang berasal dari luar Kalteng, yang kembali berpengaruh pada tingginya biaya produksi; dan
- d. Masih rendahnya kesadaran dan penerapan teknologi terbaru dalam pembudidayaan ikan, yang kemudian mengakibatkan rendahnya kemampuan pembudidaya dalam mencegah dan mengatasi perubahan gejala alam dan serangan penyakit ikan khususnya pada kawasan budidaya di Daerah Aliran Sungai (DAS);
- e. Terjadinya pandemic covid-19 selama dua tahun terakhir juga secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas pembudidaya dalam melakukan budidaya ikan karena adanya pembatasan kegiatan.

Namun poin penting dan penekanan utama pada usaha rekomendasi terhadap kendala pencapaian kinerja ini adalah poin “c”, yaitu “Masih cukup rendahnya kemampuan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan dalam memproduksi benih berkualitas yang kemudian berdampak pada sangat tergantungnya pembudidaya lokal kepada pembenih yang

berasal dari luar Kalteng, yang kembali berpengaruh pada tingginya biaya produksi”.

Memperhatikan berbagai bahasan di atas, rekomendasi yang dapat secara cepat diaplikasikan dalam rangka peningkatan jumlah produksi benih perikanan budidaya, antara lain :

- a. Optimalisasi fungsi UPT perbenihan yang dimiliki pemerintah daerah (baik kabupaten/ kota), melalui peningkatan kompetensi SDM yang ada ada, peningkatan keberadaan sarpras pendukung, dan juga kemampuan alih teknologi melalui pembinaan kepada UPR yang berada di sekitar dan menjadi wilayah kerjanya.
- b. Dinas dapat melakukan kerjasama dengan provinsi tetangga/ daerah lainnya yang teridentifikasi sebagai penyuplai benih ke Kalteng, dalam rangka menjamin kualitas dan kuantitas benih yang masuk ke Kalteng. Kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka menyaring benih yang masuk sembari menyiapkan kemampuan dalam daerah dalam menyediakan benih. Kerja sama ini telah dilakukan bersama dengan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin Kalimantan Selatan.
- c. Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya melalui sosialisasi dan temu usaha, serta menganjurkan pembudidaya untuk menggunakan benih ikan yang telah bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari UPTD/UPR;
- d. Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba yang disertai dengan penerapan teknologi terbaru yang memungkinkan intensifikasi budidaya perikanan atau melalui *pilot project* kelompok binaan pembudidaya handal;
- e. Meningkatkan upaya penyediaan pakan kepada pembudidaya ikan melalui pengadaan mesin pakan ikan skala mini kepada kelompok pembudidaya yang sudah diidentifikasi mampu menjadi contoh bagi pembudidaya lainnya; dan
- f. Jalinan intensif kerjasama pemerintah daerah dan sektor permodalan untuk mampu memberikan pendanaan kredit lunak kepada pembudidaya potensial di Kalteng.

SASARAN STRATEGIS 3

Tercapainya Angka Konsumsi Ikan (AKI)

3.2.5 Indikator Kinerja Angka Konsumsi Ikan (AKI)

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan 1 (satu) kegiatan pokok dan 1 (satu) sub-kegiatan, yaitu pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah besar dalam rangka pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran 2022 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.147.500.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp.1.089.561.688,- dengan realisasi sebesar Rp.1.024.253.501,- atau 94,01%.

Capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Angka Konsumsi Ikan Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah*

No.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
3	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	55,81	56,00*	100,34	Sangat Baik

Keterangan :

* : merupakan angka realisasi sangat sementara tahun 2022 (belum validasi)

Dilihat pada Tabel 3.8, pada tahun 2022 capaian sasaran peningkatan angka konsumsi ikan masyarakat Kalteng adalah 56,00 kg/kapita/tahun atau mencapai 100,34% dari target yang direncanakan. Capaian kinerja ini dinilai dan mencapai kategori **SANGAT BAIK**. Angka capaian ini merupakan angka realisasi sementara dari target yang telah ditetapkan karena untuk perhitungan Angka Konsumsi Ikan (AKI) ini dilakukan setiap satu tahun sekali setelah tahun berjalan bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, pergerakan AKI Kalteng dan Nasional disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11 *Perbandingan Pergerakan Nilai AKI Kalteng dan Nasional dari Tahun 2017 - 2021 pada Indikator Kinerja Angka Konsumsi Ikan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (kg/kapita/ tahun)					Kenaikan Rata-Rata per Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Kalimantan Tengah	47,63	48,22	57,18	55,50	56,28	4,57
Nasional	47,34	50,69	54,49	56,39	55,16	3,97

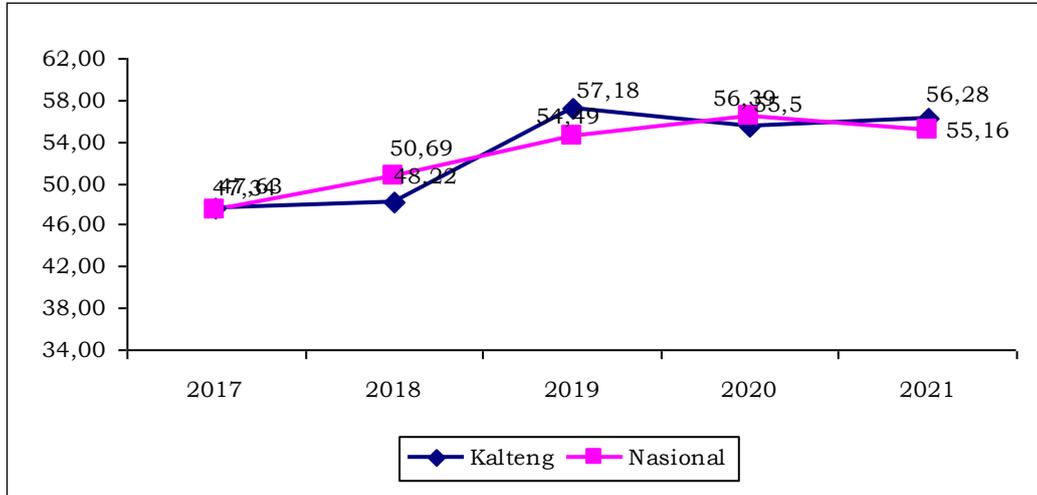
Secara sekilas, AKI Kalteng rata-rata mengalami kenaikan per tahun sebesar 4,57%. Sedangkan secara nasional terjadi peningkatan AKI rata-rata sebesar 3,97% per tahun. Perhitungan AKI ini dilaksanakan setiap tahun setelah tahun berjalan secara nasional di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan menggunakan data hasil dari Sensus Ekonomi Nasional (SUSENAS). Jadi untuk AKI tahun 2022 akan diperoleh angka tetapnya pada tahun 2023 setelah adanya perhitungan secara nasional. Sehingga pada tahun pelaporan ini masih menggunakan angka sementara yang merupakan angka estimasi dari capaian tahun sebelumnya.

Angka Konsumsi Ikan merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar. Angka Konsumsi Ikan adalah penjumlahan dari jumlah konsumsi ikan rumah tangga dengan jumlah konsumsi diluar rumah tangga dan konsumsi ikan tidak tercatat. Konsumsi ikan rumah tangga merupakan jumlah konsumsi ikan segar, ikan dalam awetan, ikan dalam makanan jadi dan ikan dalam bumbu-bumbuan. Konsumsi ikan diluar rumah tangga adalah jumlah konsumsi ikan dari hotel, restoran, dan catering. Sedangkan konsumsi ikan tidak tercatat adalah jumlah konsumsi ikan dari rumah sakit, lembaga pemasayarakatan, pondok pesantren dan panti asuhan.

Angka konsumsi ikan dalam kilogram per kapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri untuk dikonsumsi masyarakat. AKI menggambarkan kebutuhan ikan per jenis di masing-masing wilayah, untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat dan analisis preferensi konsumen di suatu daerah, selain itu untuk mengetahui besarnya kontribusi ikan terhadap konsumsi pangan khususnya pangan hewani. Angka konsumsi ikan per wilayah dimanfaatkan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan suatu wilayah dalam pengelolaan perikanan. Program GEMARIKAN

merupakan salah satu program pemerintah untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat.

Grafik pergerakan AKI Kalteng dan AKI Nasional dimaksud disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 3.3 Grafik pergerakan AKI Kalteng dan AKI Nasional Tahun 2017-2021

Dilihat dari grafik di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan Angka Konsumsi Ikan Kalteng setiap tahunnya. Bahkan AKI Kalteng ini mampu melebihi AKI Nasional. Pergerakan kenaikan AKI Kalteng yang cenderung stabil dapat dianalisa sebagai akibat dari pergerakan angka produksi perikanan yang relatif stabil, baik itu pada sektor perikanan tangkap maupun sektor perikanan budidaya. Sedangkan dari sisi produksi hasil tangkapan ikan di laut, fakta di lapangan menunjukkan sebagian produksi dimaksud diangkut untuk diperdagangkan ke luar provinsi, sehingga tidak menjadi konsumsi lokal Kalteng. Satu hal yang cukup mempengaruhi mengapa AKI Kalteng cukup tinggi adalah kebiasaan dan budaya makan ikan masyarakat Kalteng yang sudah turun temurun begitu dekat dengan aliran sungai yang menghasilkan sumber kehidupan bagi masyarakat Suku Dayak, termasuk diantaranya adalah mengonsumsi ikan.

SASARAN STRATEGIS 4

Tercapainya Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan

3.2.6 Indikator Kinerja Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan jumlah produksi produk olahan perikanan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan. Sasaran dari Program tersebut, selain bertujuan untuk Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat juga bertujuan pencapaian sasaran peningkatan jumlah produksi produk olahan hasil perikanan.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran 2022 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.147.500.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp.1.089.561.688,- dengan realisasi sebesar Rp.1.024.253.501,- atau 94,01%.

Adapun capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
4	Tercapainya Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	34.761,84	35.213,74*	101,30	Sangat Baik

Keterangan :

* : merupakan angka realisasi sangat sementara tahun 2022 (belum validasi)

Dilihat dari tabel 3.10 tersebut diketahui bahwa jumlah volume produk olahan hasil perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 mencapai 35.213,74 ton/tahun atau mencapai 101,30% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini dinilai sangat baik karena melebihi target yang ditentukan yakni 34.761,84 ton. Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap seharusnya dapat secara langsung meningkatkan produksi produk olahan. Hal ini terjadi mengingat sumber bahan baku produk olahan ikan di Kalteng sebagian besar berasal dari hasil tangkapan perairan laut dan umum, yaitu Ikan Tenggiri, Udang,

dan Ikan Pipih; dan hasil budidaya, yaitu Bandeng dan Udang. Namun berdasarkan data yang tercatat, produksi produk olahan justru menunjukkan trend cenderung stabil pada tahun 2018 sebanyak 6.301,61 Ton menjadi 6.643,95 Ton pada tahun 2019 setelah sebelumnya pada tahun 2017 volume produk olahan berada pada posisi 9.316,89 ton, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13 *Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2017 - 2021 pada Indikator Kinerja Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Ton)					Kenaikan Rata-Rata per Tahun
	2017	2018	2019	2020	2021	(%)
Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	9.316,89	6.301,61	6.643,95	15.097,94	24.402,41	40,48

Jika memperhatikan selanjutnya di tahun 2020, data menunjukkan angka 15.097,41 ton yang berarti terjadi peningkatan yang cukup besar pada volume produk olahan hasil perikanan sebesar 127,24%. Secara keseluruhan selama lima tahun kenaikan rata-rata jumlah volume produk olahan hasil perikanan cukup besar yaitu mencapai 40,48%.

Memperhatikan kondisi yang ada, terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dan kendala dalam meningkatkan pencapaian sasaran indikator kinerja ini, antara lain :

- a. Ragam produk olahan hasil perikanan yang harus dikembangkan terus agar mampu bersaing dengan produk olahan pangan lainnya, yang diharapkan dapat dipasarkan ke luar daerah bahkan mampu di ekspor ke luar negeri;
- b. Produk hasil perikanan yang cenderung mudah rusak sehingga menyebabkan nilai ekonomisnya menurun dan isu penggunaan bahan kimia berbahaya terhadap produk hasil perikanan menyebabkan daya beli masyarakat menurun terhadap produk olahan tertentu;
- c. Skala produksi olahan hasil perikanan di Kalimantan Tengah masih di skala industri rumah tangga sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah

Pada tahun 2021, produk perikanan yang memiliki SKP tahun sebanyak 13 SKP terdiri dari 4 predikat A dan 9 predikat B. 13 SKP tersebut diberikan kepada UKM Rusdiana 2 SKP, UMKM Mase Ulang 2 SKP, UMKM PMEFS 4 SKP, UMKM

Tampung Parei 1 SKP, PT. Lautan Pilar Perkasa 1 SKP, dan UMKM Poklahsar Sarirasa 3 SKP.

Sedangkan tahun 2022, produk perikanan yang memiliki SKP ada 14 SKP terdiri dari 5 predikat C, 8 predikat B dan 1 predikat A. 14 SKP tersebut diberikan kepada UMKM PMEFS 3 SKP, PD. Jaya Sakti 1 SKP, Huma Gawin Itah 5 SKP, UMKM Kerupuk Mama Erwin 2 SKP, UMKM ALuh Anga 1 SKP, Poklahsar Sarirasa 1 SKP, dan UMKM Kerupuk Amplang Ny. Hilda 1 SKP.

Pencapaian kinerja **Sasaran Strategis-4** Tahun 2022 dinilai **Sangat Baik**, dimana upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran sehingga pada tahun 2022 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sebanyak 14 SKP, lebih banyak 1 SKP dibandingkan SKP di tahun 2021. Pencapaian kinerja pada **Sasaran Strategis-4** tahun 2022 ini dinilai Sangat Baik, dimana upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan sub-kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.

Untuk itu kedepannya diperlukan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai target tahun yang akan datang antara lain :

- a. Peningkatan produksi di sektor perikanan penangkapan dan budidaya untuk meningkatkan ketersediaan ikan untuk konsumsi segar maupun sebagai bahan baku pengolahan ikan;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung proses arus barang dan jasa agar dapat lancar dari kota ke desa maupun sebaliknya;
- c. Peningkatan Nilai Tambah Produk olahan perikanan di tingkat UMKM sehingga meningkatnya minat konsumen dalam mengkonsumsi ikan;
- d. Pemberian bantuan penguatan fasilitas permodalan ke UMKM sektor Kelautan dan Perikanan;
- e. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM yang ada di UMKM;
- f. Peningkatan promosi, peluang investasi dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan.

Keberhasilan pencapaian pada **Sasaran Strategis-4** disebabkan oleh :

- (a) Peningkatan jumlah volume produksi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun budidaya;
- (b) Peningkatan jumlah UPI pengolah dan pemasar setiap tahunnya.

Yang menjadi tantangan dan kendala dalam pencapaian **Sasaran Strategis-4** adalah :

- (a) Jumlah produksi produk olahan hasil perikanan tergantung pada hasil dari produksi perikanan budidaya dan tangkap;
- (b) Keterbatasan modal untuk pengembangan usaha dari para pengolah yang sebagian dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah;
- (c) Keterbatasan sarana dan prasarana pengolah dan sebagian dari industri pengolah masih menggunakan peralatan yang tradisional.

SASARAN STRATEGIS 5 **Tercapainya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB**

3.2.7 Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada kontribusi sektor perikanan Kalimantan Tengah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan **Sasaran Strategis-5** Perhitungan PDRB ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Capaian kinerja Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah*

No.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
5	Tercapainya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	3,2	4,57	142,81	Sangat Baik

Dilihat dari tabel 3.12 tersebut diketahui bahwa kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Kalimantan Tengah pada tahun 2022 mencapai 4,57% atau mencapai 142,81% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini dinilai sangat baik karena melebihi target yang ditentukan yakni 3,2%.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Sektor perikanan membentuk nilai PDRB termasuk dalam kelompok unit produksi lapangan usaha sektor pertanian dimana kontribusinya disajikan dalam satu sektor lapangan usaha terdiri dari pertanian, kehutanan dan perikanan. Perhitungan PDRB ini menggunakan pendekatan produksi, yaitu Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Pada tahun 2022, laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 3,73%. Sedangkan kontribusi sektor perikanan mencapai 4,57% lebih tinggi dari sektor gabungan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ri sini dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi sektor perikanan mampu memberikan kontribusi lebih tinggi. Sehingga produk yang dihasilkan di sektor perikanan Kalimantan Tengah memiliki nilai tambah yang cukup tinggi.

Laju pertumbuhan PDRB sektor perikanan ini juga didukung oleh meningkatnya produksi perikanan tidak hanya dalam bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta peningkatan produksi olahan hasil perikanan. Dengan laju pertumbuhan PDRB ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor perikanan bertumbuh meningkat sejalan dengan peningkatan produksi perikanan Kalimantan Tengah.

SASARAN STRATEGIS 6
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang Optimal

3.2.8 Indikator Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan pesisir. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sasaran program ini adalah peningkatan persentase pendayagunaan sumber daya laut, pesisir dan perairan umum daratan, yang bertujuan untuk mewujudkan tertatanya dan dimanfaatkannya wilayah perairan laut, wilayah pesisir dan wilayah perairan umum daratan.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran 2022 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.445.000.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud tetap di Rp.445.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.442.451.125,- atau 99,43%.

Adapun capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Kesesuaian Pemanfaatan Ruang laut dan Pesisir di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang Optimal	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	2	2	100,00	Baik

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian dari target lokasi yang dicadangkan sebagai kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan pesisir dapat terealisasi sebanyak 2 lokasi atau setara 100,00%, sehingga termasuk kategori Baik.

Untuk mewujudkan **Sasaran Strategis-6** ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan 3 (tiga) Kegiatan Pokok dan 3 (tiga) sub-kegiatan, yaitu pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat dalam rangka pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi dalam rangka penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi, dan pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi (RZWP3K) Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039 sebagai acuan untuk mengelola wilayah pesisir dan laut Kalimantan Tengah. Adanya peraturan daerah yang menjadi landasan hukum untuk mengelola wilayah pesisir dan laut ini penting mengingat sangat berlimpahnya sumberdaya alam di wilayah laut dan pesisir Kalimantan Tengah dapat membuka peluang terjadinya eksploitasi berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta berbagai konflik antar pihak-pihak penerima manfaat. Untuk itulah diperlukan pengelolaan yang bijaksana dan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak yang berwenang agar sumberdaya alam pesisir dan laut Kalimantan Tengah dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat Kalimantan Tengah.

Sebagai tindak lanjut atas alokasi ruang tersebut maka perlu disusun atau mengeluarkan suatu dokumen mengenai Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Taman Pesisir Teluk Sebangau – Tanjung Matalayur – Kiapak Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan tersebut di dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi (RZWP3K) Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039 merupakan gabungan dari usulan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K-08) Teluk Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dan Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K-09) Sei Aceh Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target dan pengelolaan kawasan dimaksud secara baik, terdapat rekomendasi yang dapat dilaksanakan, yaitu :

- a. Menyiapkan sarpras pendukung pengelolaan kawasan, terutama dalam hal pengawasan dan pemantauan pemanfaatan kawasan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan perairan;
- b. Menyusun dan mengajukan telaahan maupun kajian pengelolaan kawasan berbasis lestari (*sustainability*) sebagai landasan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan dimaksud.

SASARAN STRATEGIS 7 **Meningkatnya Kualitas Pengawasan** **Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)**

3.2.9 Indikator Kinerja Persentase Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Ketentuan/ UU yang Berlaku

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada persentase pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan yang mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal berukuran sampai dengan 30 GT. Untuk mewujudkan **IKU-1** pada **Sasaran Strategis-7** ini dilakukan melalui Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dari 3 (tiga) sub-kegiatan dari 1 (satu) kegiatan pokok pada program tersebut, yang mendukung **IKU-1** pada **Sasaran-5** ini adalah kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil, pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil, penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran 2022 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.435.503.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud tetap di Rp.462.503.000,- dengan realisasi sebesar Rp.455.350.500,- atau 98,45%.

Capaian kinerja **IKU-1** pada **Sasaran Strategis-7** Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.16 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Ketentuan / UU yang Berlaku di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
7	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	85	100	117,64	Sangat Baik

Capaian kinerja **IKU-1** pada **Sasaran Strategis-7** ini dinilai SANGAT BAIK karena persentase kepatuhan pelaku usaha mencapai kinerja sebesar 117,64%.

Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku dilihat dari aspek pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil telah terpenuhi pemanfaatannya seluas 61.362,24 Ha atau telah mencapai keseluruhan target. Apabila dilihat dari aspek penangkapan sampai dengan 12 mil maka dapat dilihat dari hasil laporan operasi pengawasan di perairan selama tahun 2022 telah diperiksa 29 unit kapal penangkap ikan dan tidak ditemukan kapal yang tidak mematuhi ketentuan / UU yang berlaku. Dalam pelaksanaan operasi pengawasan di perairan Kalimantan Tengah tahun 2022 ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Kepolisian Resort Kotawaringin Timur, Kepolisian Resort Kotawaringin Barat, dan Kepolisian Resort Sukamara.

Hasil laporan operasi pengawasan di perairan selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.17 *Hasil Laporan Operasi Pengawasan di Perairan Kalimantan Tengah Tahun 2022*

PERIODE	TANGGAL OPERASI	HARI	DIPERIKSA	DITANGKAP	WILAYAH OPERASI
I	15 - 18 Maret 2022	2	4	0	PERAIRAN LAUT KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALTENG
II	10 Mei - 13 Mei 2022	2	0	0	PERAIRAN LAUT SERUYAN PROVINSI KALTENG
III	14 Juni - 17 Juni 2022	2	1	0	PERAIRAN LAUT KOBAR PROVINSI KALTENG
IV	30 Juni - 03 Juli 2022	2	19	0	PERAIRAN LAUT SUKAMARA PROVINSI KALTENG
V	29 Nov - 02 Desember 2022	2	5	0	PERAIRAN LAUT SUKAMARA PROVINSI KALTENG
		10	29	0	

Ada beberapa hal yang mempengaruhi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam kepemilikan izin usaha perikanan tangkap, antara lain :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengikat pelaku usaha untuk mengikuti aturan yang berlaku;
- b. Aparat pelaksana atau penegak hukum yang dapat mengayomi dan mengarahkan pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku;
- c. Kesadaran masyarakat atau pelaku usaha untuk menaati peraturan yang berlaku;
- d. Sarana dan prasarana yang memadai sehingga proses perizinan tidak memakan waktu panjang;
- e. Dana yang memadai sesuai aturan yang berlaku dan tidak dirasa terlalu berat bagi pelaku usaha.

Dalam mewujudkan **IKU-1** pada **Sasaran Strategis-7** ini agar dapat berkelanjutan dan meningkat pada tahun berikutnya maka diperlukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendataan kapal nelayan;
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pendampingan bagi pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha perikanan maupun yang belum.

3.2.10 Indikator Kinerja Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Yang Berperan Aktif Dalam Pengawasan Pemanfaatan SDKP

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada jumlah kelompok masyarakat pengawas yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk mewujudkan **IKU-2** pada **Sasaran Strategis-7** ini dilakukan melalui Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Capaian kinerja IKU ini pada Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.18 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang Berperan Aktif dalam Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah*

No.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
5	Meningkatnya kualitas pengawasan SDKP	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	45	202	448,89	Sangat Baik

Dilihat dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa capaian kinerja **IKU-2** pada **Sasaran Strategis-7** ini melebihi target yang ditetapkan 45 kelompok dan tercapai sebesar 202 kelompok masyarakat pengawas yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan atau sebesar 448,89%.

POKMASWAS berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah atau petugas, yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan kemampuan dan kewenangannya sebagai masyarakat. Pengawasan, pemantauan dan penjagaan sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan illegal yang berupa : penyetruman ikan, peracunan ikan (potas), penggunaan alat tangkap terlarang, budidaya/keramba yang terlalu banyak, dan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem perairan/danau. Untuk itu, melalui bantuan yang diberikan ini diharapkan agar peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pemantauan dapat terus ditingkatkan sehingga dapat terjalin kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan dari kegiatan-kegiatan illegal.

Salah satu upaya mengurangi pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan melalui sistem pengawasan masyarakat (SISWASMAS). Sistem pengawasan masyarakat (SISWASMAS) bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pengawasan oleh masyarakat dan menurunnya tingkat pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (termasuk ekosistem danau dan perairan umum lainnya),
 - b. Mekuatnya kelembagaan pengawasan di daerah,
 - c. Terciptanya pengawasan mandiri oleh POKMASWAS di daerah,
 - d. Terjalannya koordinasi pengawasan secara terpadu (PPNS Perikanan, Polisi, TNI-AL, dan Masyarakat), dan
 - e. Lestarinya ekosistem perairan (danau) dan pemanfaatan yang berkelanjutan.
- b. Pelaksanaan kegiatan SISWASMAS melalui pembentukan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Berdasarkan data pada Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah POKMASWAS yang telah terbentuk dan aktif sampai dengan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.19 *Jumlah POKMASWAS di Provinsi Kalimantan Tengah Pada Tahun 2022*

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah POKMASWAS (Kelompok)	Jumlah POKMASWAS Aktif (Kelompok)
1.	Pulang Pisau	5	5
2.	Kotawaringin Barat	21	21
3.	Barito Selatan	37	37
4.	Seruyan	15	14
5.	Kotawaringin Timur	43	43
6.	Barito Timur	11	11
7.	Palangka Raya	22	22
8.	Barito Utara	13	13
9.	Sukamara	6	6
10.	Kapuas	26	26
11.	Murung Raya	13	0
12.	Katingan	8	7
13.	Lamandau	9	0
14.	Gunung Mas	2	0
Jumlah		231	202

Melihat jumlah POKMASWAS yang telah terbentuk yaitu mencapai 231 kelompok tersebar di semua kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, tentunya diharapkan mampu mengurangi terjadinya pelanggaran atau kegiatan yang

merusak kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan yang ada. Namun dilihat dari keaktifannya dalam memberikan laporan terkait pengawasan bidang perikanan hanya ada 202 kelompok yang aktif memberikan laporan dan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Apabila dibandingkan dengan banyaknya kasus tindak pidana pelanggaran bidang perikanan yang terjadi dari Tahun 2017 - 2021, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.20 *Perbandingan Jumlah Kasus Pelanggaran Bidang Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2021*

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Jumlah Kasus Pelanggaran Bidang Perikanan	29	11	6	0	1

Jika dilihat pada tabel di atas, pada Tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kasus pelanggaran tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan sehingga pada tahun 2020 tidak terdapat kasus pelanggaran di bidang perikanan. Namun pada tahun 2021 terjadi satu kasus, yaitu ditemukan 1 (satu) unit kapal pengguna lampara dasar sedang beroperasi menangkap ikan di kawasan Gosong Senggora yang merupakan kawasan konservasi kemudian selanjutnya dilakukan penangkapan dan diproses penegakkan hukum oleh pihak Satpolair Polres Seruyan.

Faktor pendorong terjadinya kasus pelanggaran tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, disebabkan oleh :

- a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan biaya operasional penyidik perikanan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan tindak pidana perikanan oleh masyarakat;
- b. Kurangnya SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.

Pencapaian kinerja **IKU-2** pada **Sasaran Strategis-7** dinilai Sangat Baik, dimana upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan : kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil, pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil, penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Oleh karena itu untuk ke depan dalam rangka pencapaian kinerja tahun mendatang maka ditempuh strategi yang mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, antara lain :

- a. Memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah (pembentukan forum pengelola perairan lintas sektoral) karena dalam pengawasan di laut melibatkan banyak pihak/instansi/lembaga;
- b. Memperkuat payung hukum pengelolaan (Perda dan sosialisasi Perda);
- c. Penguatan/pembinaan dan pembentukan lembaga pengelola perairan ditingkat masyarakat;
- d. Peningkatan SDM (PPNS) pengawas perikanan dan peningkatan kualitas PPNS yang sudah ada;
- e. Penguatan lembaga adat dan kearifan lokal lainnya.

Dalam rangka optimalisasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ini, salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka membantu kepatuhan pelaku usaha perikanan maupun masyarakat dalam perizinan bidang kelautan dan perikanan maka Dinas Kelautan dan Perikanan mengembangkan aplikasi Geoportal Laut Berkah yang dapat diakses melalui website <https://geoportal-lautberkah.kalteng.go.id/>. Aplikasi ini bermanfaat sebagai berikut :

- a. Memberikan akses kepada stakeholder dalam proses Perizinan Lokasi Perairan dan perizinan pengelolaan perairan yang berlangsung di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk melaksanakan SOP Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan secara elektronik.
- b. Memberikan kepastian proses yang dapat terpantau secara kekinian / realtime oleh para stakeholder, sebagaimana SOP Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- c. Menyediakan pustaka digital terhadap berbagai proses perizinan dan dokumen terkait, yang bisa diakses dengan lebih cepat tanpa terkendala aspek geografis.
- d. Memudahkan bagi investor yang berminat untuk mendapatkan informasi terkait potensi investasi di perairan Provinsi Kalimantan Tengah.
Menyediakan peta online yang memiliki informasi terkait potensi investasi yang dapat diakses oleh stakeholder Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil penilaian terhadap 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran strategis selama tahun 2022 dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah tercapai dengan

Sangat Baik, walaupun ada 2 (dua) indikator dalam kategori Baik. Hal ini menggambarkan bahwa setiap program dan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian IKU dikarenakan adanya sinergitas antara pemangku kepentingan, pelaksana maupun masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah.

3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/ kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja seperti tersebut diatas, melainkan juga menyajikan informasi relevan lainnya agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

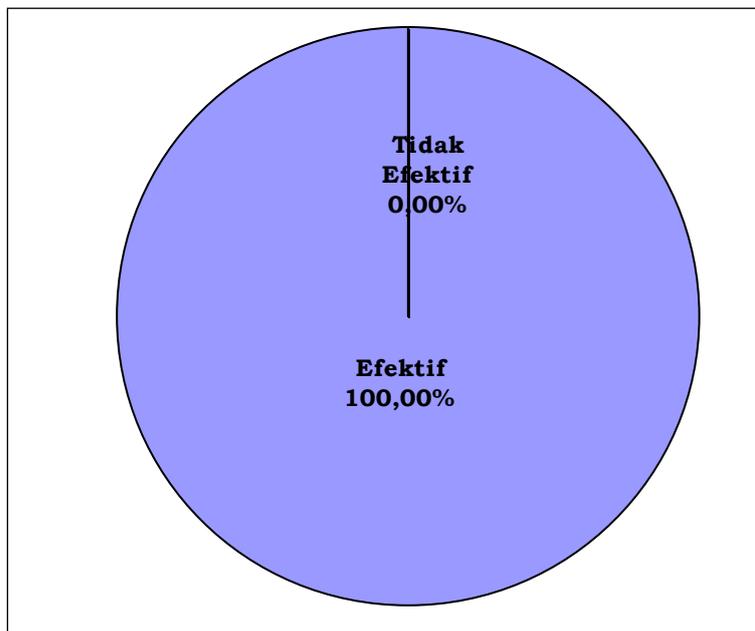
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran unit kerja sesuai dengan Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, dimana sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor riil yang sangat potensial untuk dikembangkan dengan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan yang didukung oleh tingkat produksi dan sarana/prasarana serta kualitas sumber daya manusia yang memadai.

3.3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran

Demi terwujudnya masyarakat perikanan yang sejahtera melalui pemberdayaan sumberdaya manusia, pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta jasa-jasa lingkungan yang terdapat didalamnya maka strategi pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dituangkan pada 11 kebijakan yang dijabarkan kedalam 6 (enam) Program Utama dan 17 Kegiatan Utama sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis 2021-2026, artinya terdapat keterkaitan yang erat antara pencapaian indikator kinerja kegiatan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hal tersebut ditunjukkan oleh tingkat efektifitas capaian outcome dari seluruh kegiatan sebesar 100% dinyatakan telah berhasil dalam upaya pencapaian tujuan akhir pelaksanaan program dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan umumnya.

Gambaran tingkat efektifitas capaian outcome dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.4 Efektifitas Kegiatan terhadap Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja Tahun 2021, terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja yang mencapai kategori SANGAT BAIK / BAIK.

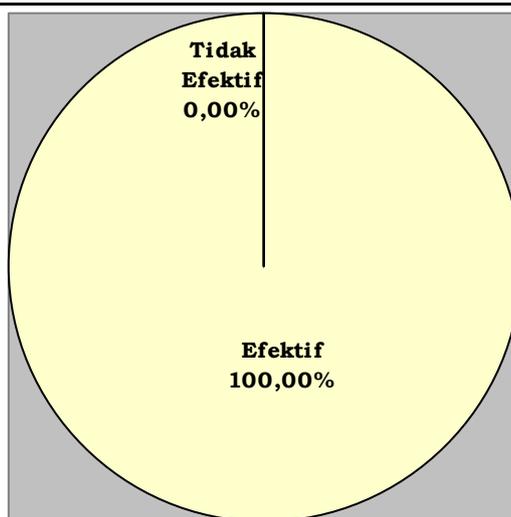
3.3.2 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan dengan Pencapaian Sasaran

Setiap kegiatan yang dilaksanakan dimaksudkan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam perumusan pencapaian indikator kinerja kegiatan harus diarahkan dan selaras dengan pencapaian sasaran. Adapun sasaran yang dapat dicapai pada Tahun 2022 melalui program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan menunjukkan bahwa pencapaian kinerja kegiatan berhasil sebesar 100% dalam mewujudkan sasaran yang ingin dicapai. Indikator keberhasilan tersebut diukur melalui indikator sasaran sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.21 *Perbandingan Indikator Pencapaian dari Target terhadap Realisasi Tahun 2022*

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%
1	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	133.136,62	153.747,57*	115,48
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	108,25	97,00	89,61
3	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	128.008,34	129.685,25*	101,31
4	Jumlah Kebutuhan Benih (ekor)	69.820	70.517*	101,00
5	Angka konsumsi ikan (AKI)(kg/kap/tahun)	55,81	56,00*	100,34
6	Jumlah Volume Produk Olah Hasil Perikanan (ton/tahun)	34.761,84	35.213,74*	101,30
7	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	3,2	4,57	142,81
8	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	2	2	100,00
9	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	85	100	117,65
10	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	45	202	448,89

Berdasarkan data hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan bahwa dari total kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja, semua kegiatan termasuk efektif dalam mewujudkan sasaran. Hal ini dapat digambarkan sebagaimana pada gambar berikut ini.



Gambar 3.5 Efektifitas Kegiatan terhadap Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Secara umum pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.22 Kegiatan Yang Secara Individual Tidak Efektif Namun Secara Bersama-sama Efisien dalam Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Nama Kegiatan	Sasaran strategis yang kurang dapat diwujudkan
-	--	--

Tabel 3.23 Kegiatan Yang Tidak Efektif dan Tidak Efisien dalam Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Nama Kegiatan	Sasaran Strategis yang Kurang Dapat Diwujudkan
-	--	--

Namun apabila ditinjau dari pencapaian indikator sasaran Tahun 2022 masih belum sepenuhnya dapat tercapai. Hal tersebut dapat dikatakan ketidaksesuaian aplikasi kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang seharusnya dilaksanakan untuk menunjang pencapaian keseluruhan sasaran sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan.

3.4 Analisis Dampak

Analisis dampak merupakan suatu analisis atau kajian mengenai dampak atau pengaruh penting suatu kegiatan yang direncanakan terhadap kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Dengan mengetahui dampak dari sasaran

strategis dan indikator kinerja yang telah direncanakan maka suatu kegiatan dapat ditentukan tingkat keberhasilan dan kegunaannya bagi masyarakat, terutama di Kalimantan Tengah.

Sasaran strategis yang direncanakan dan telah dilaksanakan pada Tahun 2022 saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dampak yang bisa dirasakan antara lain sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis-1 : Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap

Peningkatan produksi perikanan tangkap merupakan hasil dari adanya upaya melalui kegiatan yang pada tahun sebelumnya telah dilakukan. Sebagai contoh produksi perikanan tangkap, pada Tahun 2022 telah dilakukan berbagai kegiatan berupa pemberian bantuan sarana dan prasarana penangkapan (alat tangkap dan kapal/ perahu), baik yang sifatnya penambahan maupun mengganti sarana prasarana nelayan yang telah rusak, diharapkan sebagai salah satu indikator penentu terjadinya peningkatan produksi perikanan tangkap.

Pembangunan perikanan tangkap diarahkan kepada optimalisasi operasional 2 (dua) pelabuhan perikanan yang direkomendasikan untuk dikelola oleh pemerintah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas, yaitu UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai dan UPT. Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang. Optimalisasi pelabuhan perikanan yang ada ini diharapkan akan menjadikannya sebagai pusat kegiatan operasional nelayan, sehingga aktifitas pelayanan dan data perikanan tangkap dapat dilaksanakan melalui fungsi pelabuhan perikanan. Melalui pelabuhan perikanan, akses pemantauan perijinan perikanan tangkap dapat dilakukan. Dengan optimalnya pelabuhan perikanan ini maka kegiatan perikanan di wilayah pesisir dapat terpantau dan tercatat dengan baik sehingga dapat meningkatkan peran serta nelayan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

2. Sasaran Strategis-2 : Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya

Dari sisi perikanan budidaya, terdapat upaya melalui bantuan Pengadaan Kolam Sistem Bioflok Lengkap (terpasang), Pengadaan Mesin Pakan Ikan Skala Mini, Pengadaan Pakan, Pengadaan Benih dan bantuan sarana perbenihan yang sudah dimulai sejak tahun 2015. Dengan adanya upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membantu pembudidaya untuk dapat meningkatkan produksinya dan memberikan keuntungan baik secara jumlah produksi maupun meningkatkan nilai jual sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pembudidaya.

Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap seharusnya dapat secara langsung meningkatkan produksi produk olahan, hal ini terjadi mengingat sumber bahan baku produk olahan ikan di Kalteng sebagian besar berasal dari hasil tangkapan perairan laut dan umum, yaitu Ikan Tenggiri, Udang, dan Ikan Pipih; dan hasil budidaya, yaitu Patin, Lele, dan Udang.

Peningkatan sentra-sentra unit perbenihan, unit budidaya, dan unit pengolahan memiliki dampak terhadap kualitas produksi perikanan terutama pada produksi perikanan budidaya dan pengolahan. Dengan meningkatnya unit perbenihan yang mendapatkan sertifikat CPIB maka kualitas benih yang digunakan untuk pembudidayaan ikan di Kalimantan Tengah dapat terjamin. Kualitas benih yang terjamin akan menghasilkan ikan budidaya yang bermutu baik. Ikan yang bermutu baik akan menghasilkan produk olahan yang bermutu baik. Apabila kualitas benih, kualitas ikan budidaya, dan kualitas produk olahan menjadi baik maka akan meningkatkan daya jualnya dan meningkatkan pendapatan petani perikanan.

3. Sasaran Strategis-3 : Tercapainya Angka Konsumsi Ikan (AKI)

Peningkatan produksi perikanan pada **Sasaran Strategis-1** dan **Sasaran Strategis-2** juga mempengaruhi rata-rata konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Tengah pada **Sasaran Strategis-3**. Dengan meningkatnya produksi perikanan akan mengakibatkan meningkatnya tingkat konsumsi ikan masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah. Hal ini ditandai dengan meningkatnya rata-rata konsumsi ikan masyarakat menjadi sebesar 56,00 kg/kapita/tahun di Tahun 2022, yang mana selama 4 tahun terakhir selalu menunjukkan *trend* kenaikan. Dampak dari tingginya rata-rata konsumsi ikan masyarakat ini antara lain tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan sangat tinggi, meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai gizi yang terkandung dalam daging ikan untuk kesehatan, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk membeli ikan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga daging. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa program pemerintah untuk memasyarakatkan makan ikan melalui GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) berhasil memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Tengah.

4. Sasaran Strategis-4 : Tercapainya Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan

Peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI). Tidak semua orang menyukai makan ikan segar sehingga salah satu strategi yang dilakukan dalam memasyarakatkan makan ikan adalah melalui diversifikasi produk olahan hasil perikanan. Proses pengolahan hasil perikanan mampu memberikan nilai tambah pada produk-produk perikanan hasil penangkapan maupun budidaya ikan.

Ikan yang bersifat *perishable food* atau makanan yang mudah mengalami pembusukan, melalui proses pengolahan yang sesuai dengan kelayakan pengolahan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dan dapat dijual dengan nilai yang lebih tinggi. Olahan hasil perikanan yang melalui proses penggaraman/pengeringan, fermentasi, penanganan segar, maupun dalam bentuk produk siap konsumsi seperti amplang, kerupuk ikan, stik ikan, maupun olahan lainnya lebih disukai oleh masyarakat dan meningkatkan AKI Kalimantan Tengah.

Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan terutama pengolah hasil perikanan agar produktif dan inovatif dalam menciptakan ragam produk olahan yang mampu bersaing dengan produk olahan dari daerah lain. Dan tentunya, Unit Pengolahan Ikan (UPI) terus diberikan motivasi dan dorongan agar memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) agar menghasilkan produk-produk olahan hasil perikanan yang bermutu.

5. Sasaran Strategis-5 : Tercapainya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB

Sektor kelautan dan perikanan terus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Dengan semakin besarnya laju pertumbuhan PDRB di sektor perikanan maka diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha perikanan.

Dengan besarnya laju pertumbuhan PDRB sektor perikanan berdampak terhadap :

- a. Sumber daya manusia semakin memiliki kemampuan daya saing yang tinggi.
- b. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 menggambarkan keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah.

6. Sasaran Strategis-6 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang Optimal

Dengan meningkatnya kawasan konservasi perairan dan jenis yang dikelola secara berkelanjutan berdampak terhadap lingkungan antara lain :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan wilayah perairan laut, wilayah pesisir dan wilayah perairan umum daratan.
- b. Sumberdaya ikan dapat terlindungi dan dilestarikan sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik.
- c. Menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan yang dikonservasi.
- d. Menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan konservasi Kalimantan Tengah.

Dampak dari **Sasaran Strategis-6** adalah wilayah pesisir yang rusak dapat dipulihkan kembali dengan melakukan penanaman mangrove. Manfaat penanaman mangrove ini antara lain :

- a. Mencegah intrusi air laut agar air tanah tidak menjadi payau sehingga dapat dikonsumsi.
- b. Mencegah erosi dan abrasi pantai.
- c. Sebagai pencegah dan penyaring alami dari penguraian limbah organik yang sampai ke wilayah pesisir.
- d. Sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa seperti biawak, kura-kura, monyet, burung, ular, juga beberapa jenis hewan laut seperti ikan, udang, kepiting dan siput.

7. Sasaran Strategis-7 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah atau petugas yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dengan kemampuan dan kewenangannya sebagai masyarakat. Dengan pemberian bantuan kepada POKMASWAS maka berdampak antara lain :

- a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dan penjagaan sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan-kegiatan illegal.
- b. Meningkatkan pemantauan terhadap perairan di Kalimantan Tengah.
- c. Meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah Kalimantan Tengah.
- d. Sumberdaya kelautan dan perikanan dapat terjaga kelestariaannya.

- e. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan untuk mewujudkan masyarakat yang nyaman dan berkeadilan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2022 telah mempunyai 10 (sepuluh) indikator kinerja yang tertuang di dalam 7 (tujuh) sasaran strategis yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan dan meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah.

B. Realisasi Anggaran

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas selain diukur dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, juga diukur dari pengalokasian dan pemanfaatan anggarannya yang tepat sasaran. Dimana mestinya dilakukan secara transparan dan hasil kerjanya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah serta mendukung pelaksanaan kegiatan/ program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah maka telah dialokasikan anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Jumlah anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 untuk Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian strategis semula berjumlah Rp.35.356.339.000,- dan setelah perubahan anggaran berjumlah Rp.96.584.191.933,- atau ada penambahan anggaran sebesar Rp.61.227.852.933,- (173,17%). Penambahan anggaran ini dianggarkan untuk pengendalian inflasi dan program strategis Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Kalimantan Tengah yaitu Program Shrimp Estate di kabupaten Sukamara.

Pada akhir tahun anggaran 2022, realisasi keuangan sebesar Rp.42.715.808.587,- (44,23%). Secara rinci jumlah alokasi dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2022 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.24 *Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Jumlah Anggaran (Rp.)		Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2		3	4	5	6	7
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	1	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	13.947.800.000	14.652.800.000	14.286.567.284	97,50
		2	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)				
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	3.577.480.400	62.246.659.924	11.368.701.406	18,26
		2	Jumlah kebutuhan benih (ekor)				
3	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	1	Angka konsumsi ikan (AKI) (kg/kap/tahun)	147.500.000	1.089.561.688	1.024.253.501	94,01
4	Tercapainya Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan	1	Jumlah volume produk olahan hasil perikanan (ton/tahun)				
5	Tercapainya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	1	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	16.801.055.600	17.687.667.321	15.138.484.771	85,59
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP)	1	Kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan pesisir (lokasi)	445.000.000	445.000.000	442.451.125	99,43

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

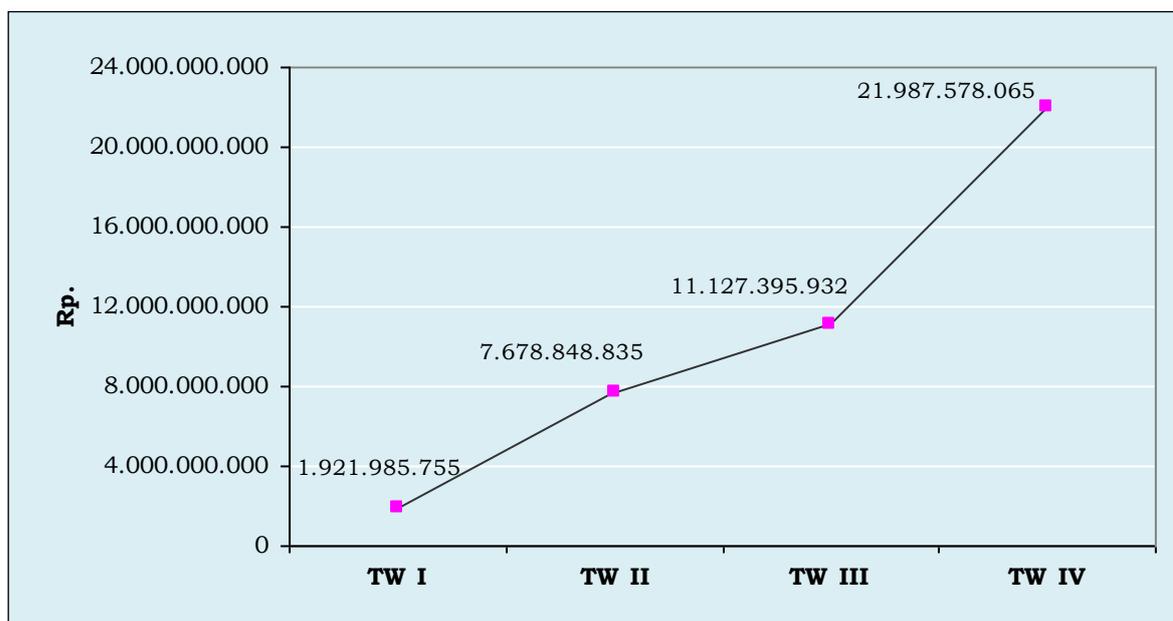
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Jumlah Anggaran (Rp.)		Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3		4	5	6	7
7	Meningkatnya kualitas pengawasan SDKP	1	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	437.503.000	462.503.000	455.350.500	98,45
		2	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)				
TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN STRATEGIS				35.356.339.000	96.584.191.933	42.715.508.587	44,23

Perkembangan daya serap keuangan per triwulan untuk Belanja Langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.25 *Perkembangan Daya Serap Keuangan Per Triwulan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	PROGRAM	Jumlah Anggaran (Rp.)		Realisasi (Rp.)				
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	1	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	133.136,62	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	13.947.800.000	14.652.800.000	56.634.300	2.811.710.431	5.266.391.829	6.151.830.724
		2	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	108,25							
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	128.008,34	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.577.480.400	62.246.659.924	83.970.000	594.376.720	1.415.314.574	9.275.040.112
		2	Jumlah kebutuhan benih (ekor)	69.820							
3	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	1	Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	55,81	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	147.500.000	1.089.561.688	24.252.000	37.612.973	6.630.000	955.758.528
4	Tercapainya Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan	1	Jumlah volume produk olahan hasil perikanan (ton/tahun)	34.761,84							
5	Tercapainya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	1	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (%)	3,2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	16.801.055.600	17.687.667.321	1.694.989.955	4.017.809.311	4.218.960.529	5.206.724.976
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang Optimal	1	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	445.000.000	445.000.000	12.070.000	85.631.400	112.974.000	231.775.725
7	Meningkatnya kualitas pengawasan SDKP	1	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	85	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	437.503.000	462.503.000	50.069.500	131.708.000	107.125.000	166.448.000
		2	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	45							
TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN STRATEGIS						35.356.339.000	96.584.191.933	1.921.985.755	7.678.848.835	11.127.395.932	21.987.578.065

Perkembangan daya serap anggaran pada tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 3.6 Grafik Perkembangan Daya Serap Anggaran Tahun 2022 Belanja Per Triwulan

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa perkembangan daya serap anggaran belanja Triwulan I sampai Triwulan III cukup stabil kenaikannya, sedangkan kenaikan pada Triwulan IV sangat drastis, dikarenakan sebagian besar realisasi keuangan yang mengikuti realisasi fisik pekerjaan, khususnya pekerjaan pengadaan barang/ jasa, terjadi pada Triwulan IV.

Realisasi keuangan di akhir Tahun 2022 hanya mampu mencapai angka 44,23%. Tidak optimalnya pencapaian realisasi keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 ini disebabkan oleh : (a) Kelebihan penganggaran belanja langsung (gaji, tunjangan, dan sebagainya); (b) Sisa atau kelebihan harga pelelangan/pengadaan barang/jasa, dan (c) Kelebihan hasil kegiatan yang tidak terealisasi pada program Shrimp Estate karena penambahan anggaran dengan jumlah besar dan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Walaupun demikian, secara umum pelaksanaan anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 dianggap telah sebagian besar memenuhi prinsip hemat, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undang dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara formal merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Media pertanggungjawaban ini ditujukan kepada pemberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang dan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang terkait (*Stakeholder*).

Dengan demikian disamping LKIP sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi juga merupakan proses mengevaluasi diri sendiri sehingga akan bermanfaat untuk lebih inovatif dan rasional dalam :

- a. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kepada pencapaian hasil;
- b. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kegiatan agar terfokus pada sasaran;
- c. Menentukan perubahan-perubahan yang diperlukan guna memperbaiki keadaan;
- d. Meningkatkan usaha-usaha agar misi dapat dilaksanakan dengan berhasil;
- e. Meningkatkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan jangka panjang.

4.1 Capaian Kinerja IKU

Penilaian hasil akhir capaian indikator kinerja utama (IKU) SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 merupakan rangkaian dari akumulasi penilaian yang dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulanan selama Tahun 2022, dengan mengacu pada RENSTRA PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan Penetapan dan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 yang telah disepakati dengan Gubernur Kalimantan Tengah. Penilaian ini dilakukan oleh tim dengan mengukur, mengevaluasi dan menganalisa data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas.

Dari hasil penilaian terhadap 10 (sepuluh) indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran strategis, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum kinerja Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah cukup baik, dengan 7 (tujuh) indikator kategori Sangat Baik dan 2 (dua) indikator dalam kategori Baik.

Terdapat 2 (dua) indikator dengan kategori BAIK (hijau), yaitu pada indikator kinerja berikut ini:

- a. Sasaran : **Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap** dengan indikator *Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)* dengan tingkat capaiannya sebesar **89,61%**; dan
- b. Sasaran : **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang Optimal** dengan indikator *Kesesuaian pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)* dengan capaian sebesar **100,00 %**.

Sedangkan prestasi kinerja kategori SANGAT BAIK (biru) dicapai pada indikator kinerja berikut ini :

- a. Sasaran : **Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap** dengan indikator *Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)* sebesar **115,48%**;
- b. Sasaran : **Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya** dengan indikator *Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)* sebesar **101,31%**;
- c. Sasaran: **Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya** dengan indikator *Jumlah Kebutuhan Benih (ekor)* sebesar **101,00%**;
- d. Sasaran : **Tercapainya Angka Konsumsi Ikan** dengan indikator *Angka Konsumsi Ikan (AKI) (kg/kap/tahun)* sebesar **100,34%**;
- e. Sasaran : **Tercapainya Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan** dengan indikator *Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)* sebesar **101,30%**;
- f. Sasaran : **Tercapainya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB** dengan indikator *Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB* sebesar **142,81%**;
- g. Sasaran : **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)** dengan indikator *Persentase Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Ketentuan / UU yang berlaku (%)* sebesar **117,65%**;
- h. Sasaran : **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)** dengan indikator *Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang Berperan Aktif dalam Pengawasan Pemanfaatan SDKP (kelompok)* sebesar **448,89%**.

Data lengkap prestasi capaian kinerja 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 termasuk yang telah disebutkan di atas, adalah sebagai berikut : (i) Jumlah Produksi

Perikanan Tangkap (Ton) mencapai 115,48% (Kategori SANGAT BAIK); (ii) Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) mencapai 89,61% (Kategori BAIK); (iii) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) mencapai 101,31% (Kategori SANGAT BAIK); (iv) Jumlah Kebutuhan Benih (Ekor) mencapai 100,73% (Kategori SANGAT BAIK); (v) Angka Konsumsi Ikan (AKI) (Kg/Kap/Tahun) mencapai 100,34 % (Kategori SANGAT BAIK); (vi) Jumlah Volume produk Olahan Hasil Perikanan (Ton/Tahun) mencapai 101,30% (Kategori SANGAT BAIK); (vii) Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%) mencapai 142,81% (Kategori SANGAT BAIK); (viii) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi) mencapai 100,00% (Kategori BAIK); (ix) Persentase Pelaku Usaha Yang Patuh Terhadap Ketentuan/ UU yang Berlaku (%) mencapai 117,65% (Kategori SANGAT BAIK); (x) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Berperan Aktif Dalam Pengawasan Pemanfaatan SDKP (Kelompok) mencapai 448,89% (Kategori SANGAT BAIK).

Untuk penilaian kinerja keuangan terkait dukungan terhadap kegiatan strategis diukur melalui realisasi keuangan. Di tahun 2022 realisasi keuangan terhadap program/ kegiatan terkait kegiatan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mencapai Rp.42.715.808.587,- (44,23%) dari pagu anggaran Rp.96.584.181.933,-.

4.2 Permasalahan

Permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja selama Tahun 2022, yaitu meliputi :

- a. Lemahnya data perikanan karena proses pengelolaan data dan informasi bidang kelautan dan perikanan yang terintegrasi di pusat membuat data-data terkait produksi perikanan dan angka konsumsi ikan Kalimantan Tengah dapat diketahui angka tetapnya setelah melalui proses validasi per semester di tingkat pusat;
- b. Tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan biaya produksi tinggi, dimana kenaikan harga pakan tersebut tidak diikuti dengan kenaikan harga jual ikan konsumsi sehingga menyebabkan pembudidaya mengalami kerugian, akibatnya banyak pembudidaya yang mengurangi kegiatan usahanya;
- c. Kualitas benih yang digunakan tidak menggunakan benih unggul sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas yang dihasilkan;

- d. Terjadinya perubahan musim yang ekstrim sehingga mengakibatkan produksi budidaya ikan menjadi menurun karena banyak benih ikan yang mengalami kematian.
- e. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap.
- f. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
- g. Pengaruh cuaca yang ekstrim sehingga mengakibatkan gelombang tinggi di laut, dimana mempengaruhi jumlah trip operasi penangkapan.
- h. Bahan bakar yang mahal, sulitnya mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi bagi nelayan, sehingga mengakibatkan berkurangnya trip penangkapan.
- i. Jumlah produksi produk olahan hasil perikanan tergantung pada hasil dari produksi perikanan budidaya dan tangkap.
- j. Keterbatasan modal untuk pengembangan usaha dari para pengolah yang sebagian dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
- k. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolah dan sebagian dari industri pengolah masih menggunakan peralatan yang tradisional.
- l. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan biaya operasional penyidik perikanan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan tindak pidana perikanan oleh masyarakat;
- m. Kurangnya SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.
- n. Tidak optimalnya pencapaian realisasi keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 yang disebabkan oleh tidak terealisasinya program Shrimp Estate karena penambahan anggaran dengan jumlah besar dan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

4.3 Upaya Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka upaya tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pencapaian target indikator ke depan antara lain :

- 1) Sejak 2017, fokus perikanan tangkap adalah rehabilitasi/ pembangunan/ pengembangan pelabuhan perikanan, yaitu dengan dimulainya Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Perikanan Kumai melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kedepannya, penyelesaian Rehabilitasi/ Pembangunan Lanjutan Dermaga Pelabuhan Perikanan Kumai akan terus dikerjakan sampai dengan 2021, sambil tetap menyiapkan kelengkapan dokumen pengembangan/ pembangunan pelabuhan perikanan lainnya.

- 2) Mendorong percepatan operasional unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
- 3) Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba.
- 4) Meningkatkan penyediaan pakan murah melalui pengadaan mesin pakan ikan skala mini kepada kelompok pembudidaya.
- 5) Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya melalui sosialisasi dan temu usaha, serta menganjurkan pembudidaya untuk menggunakan benih ikan yang telah bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari UPTD/UPR.
- 6) Pengembangan usaha pengolahan perikanan skala kecil, pengembangan diversifikasi produk olahan, pameran dan promosi produk hasil perikanan, serta ragam produk olahan bernilai tambah.
- 7) Karena dalam pengawasan di laut melibatkan banyak pihak/instansi/lembaga, sehingga diperlukan sebuah koordinasi antar lembaga pemerintah (pembentukan forum pengelola perairan lintas sektoral).
- 8) Memperkuat payung hukum pengelolaan (Perda dan sosialisasi Perda).
- 9) Penguatan/pembinaan dan pembentukan lembaga pengelola perairan ditingkat masyarakat.
- 10) Peningkatan SDM (PPNS) pengawas perikanan dan peningkatan kualitas PPNS yang sudah ada.
- 11) Penguatan lembaga adat dan kearifan lokal lainnya.
- 12) Anggaran yang diperuntukkan bagi program shrimp estate yang tidak terealisasi di tahun 2022 akan dilanjutkan pelaksanaannya di tahun 2023.

Dengan demikian diharapkan laporan kinerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, hal ini merupakan salah satu fungsi pokok dan tujuan dari LKIP. Tentunya harapan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mewujudkan peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya secara berkelanjutan dapat tercapai.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3229663 Website: [www. dislutkan.kalteng.go.id](http://www.dislutkan.kalteng.go.id) email:dislutkan@kalteng.go.id

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.**

Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, 13 Januari 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3229663 Website: [www. dislutkan.kalteng.go.id](http://www.dislutkan.kalteng.go.id) email: dislutkan@kalteng.go.id

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas dan Fungsi:

Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT), penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT), penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT);
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh gubernur.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Jumlah produksi perikanan tangkap yang terealisasi dibagi target produksi perikanan tangkap dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
		Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	Jumlah nilai tukar nelayan	Dislutkan Kalteng
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah produksi perikanan budidaya yang terealisasi dibagi target produksi perikanan budidaya dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
		Jumlah Kebutuhan Benih (ekor)	Jumlah produksi benih yang terealisasi dibagi target produksi benih dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
3	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan (AKI)(kg/kap/tahun)	AKI yang terealisasi dibagi target AKI dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
4	Tercapainya Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan yang terealisasi dibagi target produksi perikanan pengolahan dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
5	Tercapainya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB yang terealisasi dibagi dengan target kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang Optimal	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	Kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan pesisir yang terealisasi dibagi dengan target kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan pesisir dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
7	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	Realisasi persentase capaian dibagi target persentase capaian dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
		Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	Realisasi jumlah POKMASWAS yang aktif dibagi target jumlah POKMASWAS aktif dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng

Palangka Raya, 13 Januari 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196607271993031011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3229663 Website: [www. dislutkan.kalteng.go.id](http://www.dislutkan.kalteng.go.id) email:dislutkan@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.**

Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 13 Januari 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196607271993031011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3229663 Website: [www. dislutkan.kalteng.go.id](http://www.dislutkan.kalteng.go.id) email:dislutkan@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	133.136,62
		Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	(NTN/NTBi)	108,25
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	128.008,34
		Jumlah kebutuhan benih (ekor)	Ekor	69.820
3	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	Kg/kap/tahun	55,81
4.	Tercapainya Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	Ton	34.761,84
5.	Tercapainya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	%	3,2
6.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang Optimal	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	Lokasi	2
7	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	%	85
		Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	Kelompok	45

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Rp. 430.000.000,-	
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 3.577.480.400,-	
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 437.503.000,-	
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 147.500.000,-	
5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 13.947.800.000,-	
6. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi	Rp. 16.801.055.600,-	

Palangka Raya, 13 Januari 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196607271993031011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3229663 Website: [www. dislutkan.kalteng.go.id](http://www.dislutkan.kalteng.go.id) email: dislutkan@kalteng.go.id

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.**

Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama.

Palangka Raya, 13 Januari 2022
KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196607271993031011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3229663 Website: www. dislutkan.kalteng.go.id email:dislutkan@kalteng.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	137.130,72
		Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	NTN/NTBi	109,5
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	136.140,63
		Jumlah Kebutuhan Benih	Ekor	72.010
3	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	Ton	35.037,68
4	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	Kg/Kap/Tahun	57,62
5	Tercapainya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	%	3,3
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang Optimal	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (lokasi)	Lokasi	4
7	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku dari ijin pengolahan pada Unit Pengolahan Ikan	%	85
		Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP	Kelompok	48

Palangka Raya, 13 Januari 2022
KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196607271993031011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso No. 2 Palangka Raya - Kalimantan Tengah 73112

Telp. (0536) 3220517/ 3229663

Website : www.dislutkan.kalteng.go.id

Email : dislutkan@kalteng.go.id